

Menuju Masyarakat Cerdas
dan Jujur

Hal 4

Mengawal Kinerja Perlindungan WNI
di Luar Negeri

Hal 11

Perjuangan Menuntut Ilmu
di Negeri Orang

Hal 31

Pendidikan **untuk Semua**

UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.



- 3** Dari Redaksi
- 4** Menuju Masyarakat Cerdas dan Jujur
- 7** Beranjak ke Wajib Belajar 12 Tahun
- 9** Pendidikan di Tengah Hutan Malaysia
- 11** Mengawal Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri
- 14** Hasil Pemeriksaan Pendidikan di Semester II
- 19** BPK Berbagi Ilmu di Kancan Internasional
- 20** Ketua BPK Paparkan Hasil Pemeriksaan IAEA
- 22** BPK-ANAO Saling Membantu Tingkatkan Kapasitas
- 23** Bernardus Dwita Pradana, Staf Ahli BPK Bidang Manajemen Risiko Tantangan Adalah Kesempatan



- 28** Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Pemeriksaan BPK Sangat Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan
- 31** Perjuangan Menuntut Ilmu di Negeri Orang
- 34** Strategi Koperasi BPK Bersaing di Era Disrupsi
- 36** Mengasah Bakat Lukis yang Terpendam
- 38** BPK Berkomitmen Bangun Zona Integritas
- 40** Ketua BPK: Junjung Tinggi Nilai-Nilai Dasar BPK
- 41** BPK Ambil Sumpah 2 Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik
- 42** Meningkatkan Ketakwaan Melalui BPK Mengaji
- 43** Manajemen Risiko Menjaga dan Melindungi Reputasi BPK
- 48** Berita Foto

Tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahiran sosok pejuang bangsa, Ki Hadjar Dewantara menjadi hari yang selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini menjadi momentum pengingat bagi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa kita.

Warta Pemeriksa pun ingin ikut memberi andil dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini yang menjadi alasan redaksi menurunkan tema tulisan mengenai pendidikan pada edisi Mei kali ini.

Di dalam berbagai ulasan yang kami sajikan, pembaca akan melihat peran BPK dalam ikut menyukseskan pendidikan di Tanah Air. Dalam rubrik Sorotan, misalnya, kami tampilkan hasil wawancara dengan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Indonesia bisa disimpulkan dalam dua karakter, yaitu cerdas dan jujur.

Hal ini sesuai dengan ajaran yang disampaikan Bapak Pendidikan Nasional, yaitu *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. Tanpa kejujuran dan kecerdasan, berarti kita gagal menciptakan manusia Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Di rubrik Sudut Pandang juga redaksi menyajikan hasil wawancara dengan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi. Menurutnya, Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum evaluasi untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Berbagai evaluasi dan sinergi antarpemangku kepentingan pun terus dilakukan. Hal ini mengingat, pendidikan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Sepanjang manusia itu ada, maka pendidikan akan terus berjalan.

Pembaca juga bisa mendapatkan kisah inspiratif dari Staf Ahli BPK Bidang Manajemen Risiko Bernardus Dwita Pradana dalam rubrik Sosok. Melalui wawancara ini, Dwita menyampaikan bahwa tantangan bukan menjadi halangan untuk dapat maju. Alih-alih, tantangan merupakan kesempatan untuk memacu diri dan melangkah jauh ke depan.

Pada rubrik Perjalanan, redaksi menyajikan pengalaman pemeriksa BPK yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri. Dari tulisan ini pembaca bisa membayangkan bagaimana suka duka ketika belajar di negara orang.

Selanjutnya pada rubrik Internasional, kami berbagi informasi mengenai kunjungan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara ke kantor pusat National Audit Authority (NAA) Cambodia di Phnom Penh, Kamboja. Kunjungan ini merupakan implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan NAA Cambodia yang telah berlangsung sejak penandatanganan MoU di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2010.

Dengan berbagai informasi yang disajikan dalam *Warta Pemeriksa* edisi Mei ini, kami sangat berharap dapat memberikan sedikit sumbangsih untuk ikut memajukan dunia pendidikan Indonesia. Tentunya juga bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada para pembaca semua. Selamat membaca. ●

Tim Editorial

Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Redaksi

Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Radiansyah Said
Arif Rahman Hakim
Ren Jingga

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Reza Hadi Satria
Ridha Sukma
Sudarman

Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Menuju Masyarakat Cerdas dan Jujur

Sejak 2015, BPK telah menjalankan pemeriksaan tematik yang mencakup keseluruhan terkait dana pendidikan.

Pendidikan menjadi satu di antara banyak bidang yang menjadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karenanya, lembaga audit negara ini pun terus melakukan pemeriksaan terhadap institusi pendidikan di Indonesia. Harapannya, anggaran 20 persen dari APBN yang dialokasikan untuk sektor ini dapat memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat pendidikan yang berkualitas.

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menjelaskan, upaya BPK dalam melakukan pemeriksaan di bidang pendidikan untuk memastikan kualitas anggaran. "Kita harus benar-benar bisa maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan apalagi pendidikan itu sekitar 20 persen dari anggaran negara," kata dia kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, dengan menjaga *governance* di lembaga pendidikan, maka BPK bisa membantu memastikan bahwa hasil pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan para pendiri bangsa seperti tercantum dalam UUD 1945. Terkait dengan hal ini, Harry mengemukakan bahwa setidaknya ada dua tujuan penting yang harus dicapai melalui pendidikan, yaitu jujur dan cerdas.



■ Anggota VI BPK Harry Azhar Azis

“Sekarang ini banyak orang cerdas tapi kejujurannya itu jadi masalah. Yang kita butuh itu orang cerdas dan jujur. Bukan orang cerdas tidak jujur atau orang jujur tidak cerdas. Itu tidak boleh. Jadi pendidikan kita harus melahirkan orang-orang yang cerdas dan jujur. Kita mau dua-duanya agar bisa bersaing di dunia kerja. Apalagi itu perintah UUD,” papar dia.

Hal ini pun, lanjut dia, sejalan dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*. “Itu apa intinya? Intinya kejujuran dan kebenaran. Dari depan itu seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan,” jelas mantan anggota DPR RI tersebut.

Dia pun berharap ke depannya audit keuangan di bidang pendidikan dapat semakin kuat dan ditingkatkan. Bahkan pada akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan dalam penyelenggaraan *governance* sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah tak perlu lagi khawatir mengenai pengelolaan keuangan di sektor ini.

“Yang kita perlu khawatirkan adalah apa dampak dari pengelolaan keuangan itu. Apa manfaat yang kita sampaikan. Jadi seberapa besar dana pendidikan itu telah membuat orang-orang yang jujur dan cerdas di Indonesia,” tambah Harry.

Dana PIP

Dalam IHPS II 2018, pendidikan juga menjadi bagian dari pemeriksaan yang dijalankan BPK. Bahkan sejak 2015, BPK telah menjalankan pemeriksaan tematik yang mencakup keseluruhan terkait pengelolaan pendidikan. Mulai dari pendanaannya, sarana prasarannya, kurikulumnya, hingga guru.

Dalam pemeriksaan itu, memang ada beberapa hal yang menjadi temuan BPK. Yang paling signifikan adalah terkait Program Indonesia Pintar



Seberapa besar dana pendidikan itu telah membuat orang-orang yang jujur dan cerdas di Indonesia.

(PIP). “Signifikan maksudnya saldo PIP nilainya kan untuk tahun 2018 masih ada Rp2 triliun sekian yang belum tersalurkan dari total anggaran Rp10 triliun,” ujar dia.

PIP merupakan program pemerintah yang dilaksanakan sejak 2015. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Program ini juga bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

Terkait PIP, BPK pun menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, menyusun kajian dan merumuskan dalam pedoman tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP. Mu-

lai dari proses pengusulan sampai dengan pencairan. Terutama penentuan waktu yang paling dibutuhkan untuk penerima sebagai acuan batas keterlambatan penyaluran.

Rekomendasi kedua, menyempurnakan juklak PIP yang memuat antara lain peran dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam pengusulan dana calon penerima PIP. Termasuk juga mengatur prosedur *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi.

“Pada 2018, ada dana sebesar Rp889.698.850.000 yang dikembalikan ke kas negara karena belum diaktivasi oleh siswa. Dana tersebut merupakan dana yang telah disalurkan pada 2015 dan 2016,” papar dia.

Data Realisasi PIP dari 2015-2018

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2015	9.306.166.000.000	9.283.967.500.000
2016	9.584.796.425.000	9.582.670.025.000
2017	9.720.645.000.000	9.540.966.151.640
2018	9.713.044.175.000	9.713.032.264.000

JENJANG	DANA YANG BELUM TERSALUR (Rp)	DANA YANG TELAH DIKEMBALIKAN KE RKUN (Rp)	DANA DI BANK PENYALUR (Rp)
SD	888.356.700.000	198.505.350.000	698.851.350.000
SMP	906.732.000.000	214.060.500.000	692.671.500.000
SMA	436.913.500.000	184.669.000.000	252.244.500.000
SMK	889.542.000.000	292.464.000.000	597.078.000.000
Jumlah	3.121.544.200.000	889.698.850.000	2.231.845.350.000



Menurut Harry, belum tersalurkannya dana PIP karena belum diaktivasi oleh siswa itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kendala di tiap provinsi pun berbeda. Berdasarkan wawancara BPK dengan pengelola PIP antara lain diketahui bahwa hal itu terjadi karena di DKI Jakarta, misalnya, ada bantuan serupa yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, terdapat juga perda yang melarang peserta

didik menerima bantuan yang sama dari pemerintah. Karena nilainya lebih besar dari PIP, maka peserta didik lebih memilih untuk menerima KJP.

Sedangkan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, kendalanya lantaran ketiganya merupakan provinsi dengan jumlah peserta didik terbesar di Indonesia. Sehingga penyalurannya membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang provinsi lain.

Tiga Provinsi dengan Tingkat Aktivasi Paling Rendah pada 2018

JENJANG	NO PROVINSI	JUMLAH SISWA	NOMINAL (Rp)
SD	1. Jawa Barat	160.738	61.267.725.000
	2. Jawa Timur	123.693	47.966.850.000
	3. Jawa Tengah	119.607	44.569.575.000
SMP	1. Jawa Barat	79.895	44.662.500.000
	2. Nusa Tenggara Timur	59.919	34.184.625.000
	3. Jawa Timur	56.801	31.632.375.000
SMA	1. Jawa Barat	27.991	21.004.500.000
	2. Jawa Tengah	22.923	17.444.500.000
	3. Jawa Timur	21.177	15.681.000.000
SMK	1. Jawa Barat	78.331	59.705.500.000
	2. Jawa Tengah	66.704	49.509.000.000
	3. Jawa Timur	49.524	38.123.000.000

”

Alhamdulillah semakin ke sini rekomendasi kita semakin bermanfaat bagi pendidikan.

Meskipun begitu, Harry mengapresiasi kinerja dan kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ini antara lain dengan adanya tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK. Untuk masalah PIP, misalnya, Kemendikbud telah melakukan beberapa upaya percepatan penyaluran PIP untuk meningkatkan jumlah siswa yang melakukan aktivasi.

Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 2 tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang menyebutkan dua hal pokok. Pertama, mempercepat pencairan dana PIP tahun 2015, 2016, dan 2017 kepada penerima yang belum mencairkan/mengaktivasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Kedua, mengembalikan saldo dana PIP tahun 2015 dan 2016 yang belum diaktivasi oleh penerima PIP ke RKUN paling lama tanggal 30 Juni 2018.

Hasilnya, ujar Harry, saldo yang belum tersalurkan semakin berkurang tiap tahunnya. Hal ini merupakan pelaksanaan dari rekomendasi yang disampaikan BPK.

“Masalahnya mulai berkurang, jadi masalahnya tinggal aktivasi saja. Terus kemudian untuk perjanjian kerja sama dengan bank juga ada rekomendasinya dan mereka sudah lakukan. Alhamdulillah semakin ke sini rekomendasi kita semakin bermanfaat bagi pendidikan, lebih memperbaiki sistem penyaluran PIP,” papar dia. ●

Program wajib belajar 12 tahun diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagakerjaan. Sebab, sebanyak 51 persen tenaga kerja di Indonesia saat ini didominasi lulusan SD.

Beranjak ke Wajib Belajar 12 Tahun



kemdikbud.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selain itu, warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, pemerintah selalu berupaya sebaik mungkin guna menjalankan setiap amanat yang ada di dalam UU tersebut. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik

Suhardi mengatakan, amanat menjalankan wajib belajar 9 tahun sudah berjalan baik. "Kita kini justru beranjak ke wajib belajar 12 tahun," kata Didik kepada *Warta Pemeriksa*, Jumat (10/5).

Ia menjelaskan, program wajib belajar 12 tahun dilakukan oleh pemerintah daerah yang sudah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Namun, wajib belajar 9 tahun tetap menjadi prioritas, utamanya bagi daerah-daerah yang belum menuntaskannya.

"Jangan sampai ada daerah yang wajib belajar 9 tahunnya belum selesai, wajib belajar 12 tahun juga dilakukan. Tentu, prioritasnya adalah

yang wajib belajar 9 tahun terlebih dahulu," ujar dia.

Jika merujuk pada Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017/2018, tingkat angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan SD sederajat mencapai 105,89 persen. Jumlah siswa mencapai 29.484.359 orang dari jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun) yang sebesar 27.843.400.

Begitu pula di jenjang pendidikan SMP sederajat. Tingkat APK mencapai 102,08 persen. Namun, untuk tingkat SMA sederajat baru mencapai 86,94 persen.

APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Didik mengatakan, program wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ketenagakerjaan. Sebab, sebanyak 51 persen tenaga kerja di Indonesia saat ini didominasi lulusan SD. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun, diharapkan tenaga kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah.

"Dalam program wajib belajar 12 tahun ini, pemerintah pun tentu berkewajiban melayani anak-anak bangsa dimanapun mereka berada," Didik menegaskan.

Hal itu, kata Didik, juga berlaku bagi anak-anak dari warga negara Indonesia yang bekerja di perbatasan Malaysia dengan Indonesia, seperti di Sabah. Ia menceritakan, anak-anak tersebut bersama orang tuanya hidup di perkebunan sawit. Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak itu, pemerintah memiliki sekolah di luar negeri yang memang dikhususkan bagi anak-anak TKI.

"Bagi anak-anak di luar negeri baik di perkotaan maupun di kampung-kampung, di kebun-kebun, harus kita berikan akses pendidikan sesuai kondisi mereka. Kalau mereka tak bisa di sekolah reguler, kita carikan di sekolah alternatif misalnya SMP terbuka atau paket-paket yang kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka," katanya

Ada banyak program yang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah program repatriasi. Didik mengatakan, pemerintah memulangkan anak-anak TKI di Sabah yang sudah lulus SMA untuk melanjutkan pendidikan ke per-

guruan tinggi.

"Itu dibiayai pemerintah. Mereka diberikan beasiswa sehingga mereka betul-betul bisa terentaskan dari kemiskinan nantinya. Itu sudah kita lakukan sejak 2010."

Pemerintah turut mendirikan sekolah-sekolah khusus di perkebunan sawit. "Jadi anak-anak di kebun sawit yang *gak* bisa sekolah, didirikan tempat-tempat belajar itu sampai SMP. Kemudian, SMA dibawa ke Indonesia. Tapi, sebagian ada yang di Sabah juga jika sudah didirikan sekolah di dekat tempat tinggal mereka. Setelah lulus SMA, dilanjutkan sampai perguruan tinggi," ujar dia.

Sementara itu, terkait pemerataan pendidikan di Indonesia, Didik menyebutkan ada tiga tantangan utama dalam melaksanakannya. Ketiga tantangan itu adalah kondisi geografis, kondisi perekonomian, hingga motivasi orang tua

terhadap anak.

Didik menceritakan, masih banyak orang tua di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang berpendapat bahwa pendidikan hanya untuk masyarakat mampu. Hal tersebut berdampak pada tidak termotivasinya anak untuk meraih ilmu setinggi mungkin.

Dalam situasi inilah, kata Didik, pemerintah hadir untuk menyadarkan bahwa pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar menuju kehidupan yang lebih baik.

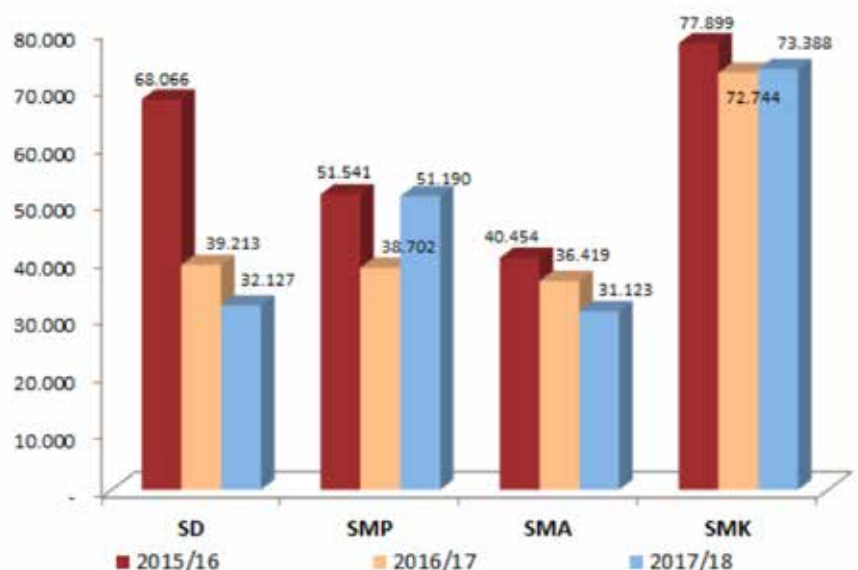
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan beasiswa terhadap anak berprestasi. Kemudian, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah, pembinaan profesionalisme guru, dan beberapa sarana penunjang lainnya. ●

Angka Partisipasi Kasar

Jenjang Pendidikan	Kelompok Usia	Penduduk Usia Sek.	Jumlah Siswa	APK (%)
SD sederajat	7-12 tahun	27.843.400	29.484.359	105,89
SMP sederajat	13-15 tahun	13.440.400	13.719.808	102,08
SM sederajat	16-18 tahun	13.305.400	11.568.351	86,94

APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Jumlah Siswa Putus Sekolah



Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan 2017/18

Pendidikan di Tengah Hutan Malaysia



Pxhere.com

Diplomasi intensif yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sukses meyakinkan Pemerintah Malaysia agar bersedia memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia.

Pendidikan adalah hak segala bangsa. Negara wajib hadir menyelenggarakan pendidikan dimanapun anak-anak bangsa berada, tak terkecuali bagi mereka yang hidup di negeri orang.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya keras menjamin pendidikan bagi anak-anak dari pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya seperti yang dilakukan terhadap anak-anak dari WNI yang bekerja di perkebunan sawit di Malaysia.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Andri Hadi mengatakan, anak-anak PMI merupakan aset bagi bangsa

dan negara Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, akses pendidikan bagi mereka sangat penting untuk tetap diberikan meskipun tinggal dan menetap di luar negeri.

"Pendidikan hak semua warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan," kata Andri saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* di kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (17/5).

Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran tidaklah mudah, terutama di Malaysia. Andri mengatakan, Malaysia memiliki peraturan yang melarang pekerja migran untuk membawa keluarga, termasuk anak. Oleh karena itu, anak pekerja migran tidak mendapat akses pendidikan formal di Malaysia.

Pemerintah tak tinggal diam atas kondisi tersebut. Melalui Kemenlu, pemerintah melakukan diplomasi secara intensif untuk meyakinkan Pemerintah Malaysia agar bersedia memberikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI. “Di sinilah peran penting diplomasi perlindungan,” ujar dia.

Berkat diplomasi tersebut, Indonesia-Malaysia pada *Annual Consultation* yang dilakukan presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan mantan perdana menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Lombok tahun 2004, berhasil melobi Malaysia. Malaysia menyetujui pengiriman guru-guru Indonesia ke Sabah guna membantu pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di sana melalui *Community Learning Center* (CLC).

CLC merupakan sekolah informal yang didedikasikan bagi anak-anak WNI yang orang tuanya bekerja di ladang-ladang yang ada di Malaysia. “CLC ini adanya di ladang-ladang dan disebar. Ada di Sabah, Serawak. Posisinya ada di tengah hutan.”

Andri sudah pernah mengunjungi salah satu CLC yang ada di Malaysia. Ia merasa terharu ketika melihat langsung penyelenggaraan pendidikan di sana. Apalagi, guru-guru yang mengajar di CLC sangat menunjukkan dedikasinya.

Ia menceritakan, kegiatan belajar dan mengajar di salah satu CLC dilakukan di sebuah kontainer. Kontainer itu dimodif menjadi ruang kelas. Ada jendela sebagai ventilasi udara, meja dan kursi belajar. Kata dia, fasilitas CLC tak hanya disediakan untuk anak-anak dari PMI legal, tapi juga yang ilegal. “Karena pendidikan itu buat semua,” katanya.

Andri merasa semakin terharu karena anak-anak di sana begitu semangat untuk menimba ilmu walaupun ada yang membutuhkan waktu 5-6 jam untuk ke lokasi CLC. “Tapi mereka senang sekali bersekolah di situ. Mereka sangat bersemangat untuk sekolah. CLC ini untuk jenjang SD sampai tingkat SMP,” katanya.



■ Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Kemenlu Andri Hadi

”

Dalam negosiasi selanjutnya, akses pendidikan CLC yang pada awalnya hanya ada di wilayah Sabah, akhirnya dapat diperluas sehingga juga menjangkau wilayah Serawak.

Penyelenggaraan pendidikan di Malaysia merupakan salah satu prioritas pemerintah. Hal ini lantaran mayoritas anak-anak Indonesia usia sekolah di luar negeri berada di Malaysia.

Setelah kesepakatan pada pertemuan *Annual Consultation* 2004, Kemenlu terus melakukan diplomasi intensif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Pada *Annual Consultation* 2006 antara mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan mantan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, tercapai kesepakatan pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

“Dalam negosiasi selanjutnya, akses pendidikan CLC yang pada awalnya hanya ada di wilayah Sabah, akhirnya dapat diperluas sehingga juga menjangkau wilayah Serawak,” ujarnya.

Pembiayaan CLC di ladang-ladang

sawit di Sabah dan Serawak dibiayai perusahaan dan juga didukung pembiayaan Pemerintah RI. Bangunan dan gaji guru dibiayai perusahaan atau pemilik ladang. Pemerintah RI membiayai guru pamong, memberikan insentif untuk guru yang sudah ada, juga memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana-dana pendidikan lainnya.

Hingga Mei 2019, terdapat 356 CLC di wilayah Sabah dan Serawak. Jumlah siswanya sebanyak 18.879 orang. Selain itu, masih terdapat 10.891 orang siswa yang mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Humana. Sehingga, total ada sebanyak 29.770 orang anak pekerja migran Indonesia yang telah memperoleh akses pendidikan dari total keseluruhan anak PMI di Sabah dan Serawak yang diperkirakan mencapai 50 ribu anak.

Pemerintah juga menyediakan akses pendidikan formal. Kemenlu bersama Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Dengan adanya peraturan bersama itu, SILN diprioritaskan bagi WNI. SILN berada di negara yang jumlah WNI-nya relatif banyak. Saat ini, SILN berdiri di 14 lokasi, antara lain di Bangkok, Kairo, Johor Bahru, Singapura, Tokyo, Makkah, Riyadh, Jeddah, dan Yangon. Ada 316 orang guru yang mengabdikan diri di SILN dengan jumlah murid sebanyak 1.671 siswa, terdiri atas 2.203 siswa SD dan 856 siswa SMP.

Andri menjelaskan, tidak di semua negara ada Sekolah Indonesia. Pendirian Sekolah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Mendikbud Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015. Harus ada studi kelayakan terlebih dahulu dari Perwakilan RI tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, ekologis, keuangan, sosial, budaya, dan jumlah pendaftar paling sedikit 32 orang WNI. ●

Mengawal Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri

BPK akan terus memperluas pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri ke beberapa titik.

Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri jadi program prioritas nasional dan merupakan salah satu isu strategis dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) 2015-2019. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan kinerja, mengawal agar program tersebut berjalan maksimal.

Pada semester II 2018, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri tahun 2017-semester I tahun 2018 yang dilaksanakan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) 2018. BPK menyimpulkan, KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong cukup efektif dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, pemeriksaan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BPK untuk memastikan program-program perlindungan WNI di luar negeri yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan hasil maksimal. "Selain itu, sudah waktunya kita mengetahui



bagaimana sebenarnya kinerja dari Perwakilan RI di luar negeri dalam melayani dan melindungi warga negara kita di luar negeri," kata Agung kepada *Warta Pemeriksa*, Selasa (14/5).

Pemeriksaan kinerja KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong merupakan pemeriksaan lanjutan. Agung menjelaskan, BPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kinerja terkait perlindungan WNI di luar negeri pada Kementerian Luar Negeri pada 2015 dan 2016. Pemeriksaan juga dilakukan pada KJRI Johor Bahru, Jeddah, Los Angeles, dan Cape Town.

Agung menambahkan, BPK memandang perlu untuk juga melakukan pemeriksaan di KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong karena jumlah WNI di kedua negara tersebut sangat banyak. Per Desember 2017, kata dia, jumlah WNI legal yang ada di Seoul tercatat

sebanyak 37.139 orang. Sedangkan di Hong Kong, jumlah WNI sebanyak 169.885 orang,

Dengan jumlah WNI yang besar itu, maka potensi resiko yang ada akan semakin besar pula. Begitu pula dengan kompleksitas masalah yang dihadapi KBRI/KJRI. "Khususnya ketika mereka (WNI) akan pulang. Apalagi baik di Seoul maupun di Hong Kong, tenaga kerja Indonesia ada sangat banyak di sana, baik yang legal maupun yang ilegal," ucap Agung.

Agung menjelaskan, pada saat pemeriksaan awal dilakukan terhadap Kemenlu dan beberapa KJRI, BPK menyimpulkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dari aspek kelembagaan, dukungan sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan belum sepenuhnya efektif.



■ Anggota I BPK Agung Firman Sampurna

Namun, dalam pemeriksaan lanjutan di KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong, BPK menyimpulkan sudah efektif. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi catatan BPK dan perlu dicermati. Salah satunya mengenai standar pelayanan publik. Penyusunan, penetapan, publikasi standar dan maklumat pelayanan publik KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan dan komponen sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong, ujar Agung, belum menetapkan keputusan kepala perwakilan tentang standar pelayanan publik yang diselenggarakan perwakilan. Komponen standar pelayanan yang ada pun belum terintegrasi dalam suatu standar pelayanan terpadu karena masih ditetapkan secara terpisah ataupun belum tersedia. Kemudian, penetapan komponen standar pelayanan tersebut belum melalui partisipasi masyarakat. Akibatnya, KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong selaku penyelenggara pelayanan publik dan WNI selaku penerima pelayanan tidak memiliki acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan. Kondisi tersebut disebabkan jajaran KBRI Seoul dan KJRI

”

Sudah waktunya kita mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja dari Perwakilan RI di luar negeri dalam melayani dan melindungi warga negara kita di luar negeri.

Hong Kong belum memahami adanya kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar dan maklumat pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009.

“Jadi, perlu ada standar pelayanan publik. Sudah barang tentu yang dimaksud standar pelayanan publik ini tidak hanya menyangkut warga negara Indonesia, tetapi menyangkut semua

pelayanan dalam program *citizenship services* yang harusnya diputuskan dengan keputusan kepala perwakilan di sana. Tetapi itu belum dilaksanakan di sana,” katanya.

Catatan BPK lainnya, KJRI Hong Kong belum memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur penerimaan laporan diri WNI ke perwakilan. Sementara itu, data WNI yang diperoleh dari masing-masing sarana penerimaan laporan diri dan registrasi WNI oleh KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum terintegrasi menjadi basis data yang tunggal dan andal. Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa sosialisasi terkait kewajiban laporan diri yang dilakukan KBRI Seoul dan KJRI Hong Kong belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan kesadaran laporan diri WNI. Akibatnya, jumlah dan data WNI yang ada tidak dapat diketahui secara pasti dan potensi terlambatnya respons dan bantuan serta perlindungan konsuleran dari perwakilan terutama pada saat kondisi darurat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Perwakilan RI di Seoul dan Hong Kong agar melaksanakan beberapa perbaikan. Pertama, menyusun, menetapkan, dan memublikasikan standar

dan maklumat pelayanan untuk masing-masing kategori/jenis pelayanan dengan tahapan dan komponen sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) dan satker terkait dalam hal penyusunan dan penetapan standar pelayanan.

Kemudian, berkoordinasi dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI dan satker lain terkait dalam hal penetapan sistem, mekanisme, dan prosedur untuk menerima lapor diri atau registrasi WNI di wilayah akreditasi, segera melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan integrasi data WNI yang dimiliki masing-masing fungsi untuk menghasilkan basis data WNI yang tunggal dan terintegrasi.

Agung menegaskan, BPK akan terus memperluas pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri ke beberapa titik. "Karena ada beberapa tempat yang saya agak meragukan bisa seefektif di Seoul dan Hong Kong. Salah satunya di Singapura," ungkap dia.

Ia menilai, kualitas diplomasi di Singapura perlu diperbaiki. Kurang baiknya diplomasi di Singapura menyebabkan Sekolah Indonesia di sana tidak diperpanjang. "Jadi bisa dibayangkan anak-anak WNI di sana tidak bisa sekolah karena tempat untuk sekolah tidak diperpanjang," ujarnya.

BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja atas perlindungan WNI di luar negeri, seperti di Seoul dan Hong Kong, menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. BPK juga melakukan penelitian dengan menggunakan sejumlah WNI di sana untuk dijadikan sampel. "Kita tanyakan kepada mereka sejauh mana daya tanggap dari petugas di masing-masing perwakilan di sana, dan hasilnya memang dari kedua KJRI dan KBRI yang ada di sana (Seoul dan Hong Kong) cukup bagus menanggapi masalah-masalah yang muncul," kata Agung.



■ Aplikasi Safe Travel

Perlindungan WNI Prioritas Kemenlu

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Kemenlu menjadikan perlindungan WNI sebagai salah satu dari empat prioritas politik luar negeri, selain melindungi kedaulatan bangsa, memajukan diplomasi ekonomi, dan peningkatan kerja sama regional dan internasional.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Andri Hadi mengatakan, keempat prioritas politik luar negeri tersebut selalu ditekankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

agar dijalankan semaksimal mungkin.

"Upaya-upaya perlindungan WNI di luar negeri dilakukan melalui Perwakilan RI di luar negeri sebagai *first responder* penanganan kasus," kata Andri saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* di kantor Kemenlu, Jakarta, pada 17 Mei 2019.

Sejumlah upaya perlindungan dilakukan dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan permasalahan WNI di luar negeri. Kemudian, menyediakan shelter/rumah penampungan sementara bagi WNI sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Selain itu, Kemenlu juga memberikan bantuan hukum. Upaya lainnya adalah memfasilitasi proses pemulangan WNI kembali ke Indonesia dalam bentuk pemulangan mandiri, deportasi, dan repatriasi.

Selain penanganan kasus, Kemenlu juga melakukan upaya preventif melalui penguatan sistem pelayanan dan perlindungan serta diplomasi perlindungan. "Salah satu upaya preventif itu adalah kita sudah membangun informasi Portal Peduli WNI dan Safe Travel," ujar dia.

Terkait pemeriksaan kinerja, Andri mengatakan Kemenlu sangat mengapresiasi. Ia menjelaskan, sebelum pemeriksaan kinerja dilakukan, BPK dan Kemenlu telah melakukan serangkaian diskusi intensif untuk membahas sasaran dan aktivitas pemeriksaan.

Menurut dia, proses diskusi dan koordinasi berjalan sangat baik. "Hal itu memberikan wawasan baru bagi kami mengingat pemeriksaan kinerja ini merupakan pengalaman pertama bagi Kemenlu," ungkap Andri.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kinerja dan uji petik di empat Perwakilan RI yaitu Jeddah, Johor Bahru, Cape Town, dan Los Angeles untuk periode 2015 dan 2016, telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja pada Juni 2018.

"Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam LHP tersebut sangat bermanfaat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan perlindungan WNI," kata Andri. ●

Hasil Pemeriksaan Pendidikan di Semester II

Pada semester II 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus Program Indonesia Pintar serta akses kualitas dan relevansi perguruan tinggi.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Salah satu tema tersebut adalah Pendidikan.

Pada semester II 2018, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 3 objek pemeriksaan terkait dengan tema pendidikan, khususnya terkait dengan fokus Program Indonesia Pintar serta akses kualitas dan relevansi perguruan tinggi. Pemeriksaan tersebut meliputi penetapan daya tampung perguruan tinggi negeri dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar), serta peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian. Ketiga pemeriksaan itu dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018.

Pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN tahun anggaran 2016 dan 2017 dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan instansi terkait lainnya, dengan kesimpulan cukup efektif.

Untuk menjalankan program tersebut, Kemenristekdikti dan PTN antara lain telah menetapkan regulasi penetapan daya tampung untuk masing-masing pola penerimaan. Kemudian, Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung. Panitia pusat juga telah membuat Prosedur Operasional Baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.

Meski begitu, ada sejumlah permasalahan yang ditemukan. Beberapa permasalahan itu adalah belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.

Perencanaan anggaran SBMPTN juga belum

mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya. Selain itu, sisa belanja penguasaan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

Rekomendasi BPK kepada Menristekdikti:

- Menerbitkan Permenristekdikti terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk: a) mendefinisikan kembali pengertian seleksi mandiri secara lebih jelas tentang penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman; dan b) mengatur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana terkait pengalihan kuota daya tampung untuk masing-masing jalur dalam rangka mengantisipasi bangku kosong melalui SK Rektor.
- Menginstruksikan Dirjen Belmawa memerintahkan panitia pusat menambahkan dalam POB terkait perhitungan kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN dengan mempertimbangkan sisa dana PNBK SBMPTN tahun sebelumnya. Selain itu, mengevaluasi penyusunan anggaran kegiatan SNMPTN dan SBMPTN tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Memerintahkan Dirjen Belmawa mengkaji kembali sistem pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN yang selama ini berjalan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada, menagih ke PTN-PTN yang belum mengembalikan sisa dana penguasaan SNMPTN dan SBMPTN serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp18,85 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas penetapan daya tampung PTN dan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp18,85 miliar.

Program BOS dan PIP

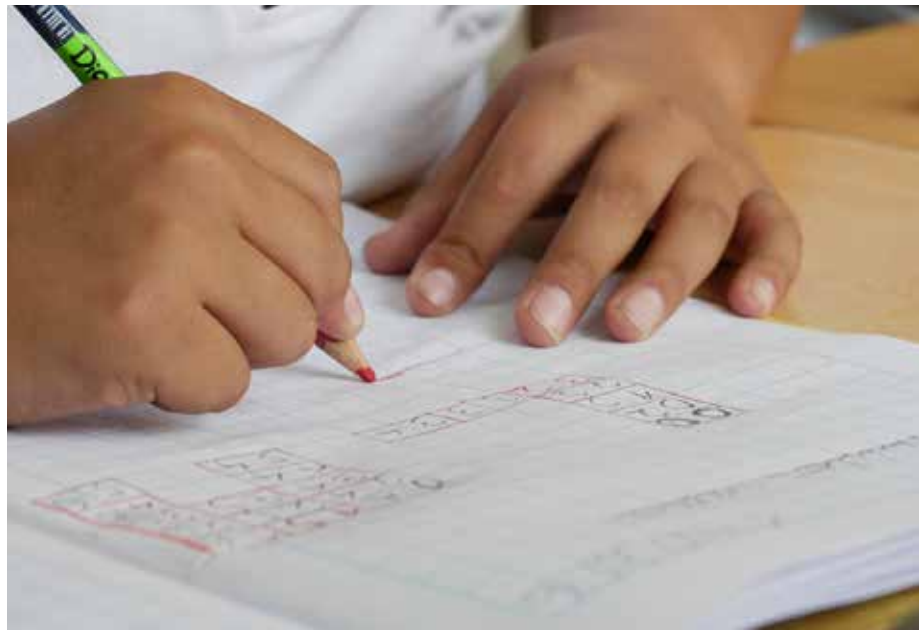
IHPS II 2018 juga menyajikan pemeriksaan kinerja tematik atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk TA 2015-semester I tahun 2018 serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan turut dilakukan atas 54 objek pemeriksaan pada 54 pemerintah daerah.

BPK mencatat ada beberapa upaya dan capaian Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP demi mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Upaya dan capaian tersebut antara lain, penetapan alokasi dana BOS oleh Kemenkeu sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud. Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atas angka alokasi BOS yang telah diajukan oleh Kemendikbud. Sehingga, apabila terdapat angka usulan yang tidak sesuai dengan kemampuan anggaran negara, maka mekanisme yang ditempuh oleh Kemenkeu adalah meminta Kemendikbud untuk menyesuaikan usulan alokasi.

Kemudian, jumlah dana BOS yang disalurkan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Kemenkeu. Selain itu, proporsi penyaluran dana BOS per triwulan juga telah sesuai dengan Juknis BOS. Kemendikbud pun telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan SK penerima.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya, keberhasilan yang telah dicapai, serta permasalahan yang ditemukan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan upaya Kemendikbud dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP belum sepenuhnya efektif.

Ada sejumlah permasalahan yang ditemukan BPK. Dalam hal ketepatan jumlah, penetapan dan pengalokasian jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta Juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani. Akibatnya, pengalokasian dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik) berisiko tidak akurat dan pencapaian tujuan pemberian dana BOS untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran kurang optimal. Hal tersebut terjadi antara lain karena lemahnya pengendalian pada aplikasi Dapodik dan proses pemutakhiran, verifikasi dan validasi data peserta didik dari



Lourdes RiqueGrentz - Pixabay

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan sekolah belum optimal serta perumusan penganggaran dana BOS belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.

Temuan BPK lainnya adalah bahwa alokasi pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui PIP belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari perhitungan *unit cost* per peserta didik belum berdasarkan kajian kebutuhan biaya personal dan data usulan calon penerima PIP belum terverifikasi dan tervalidasi dalam rangka penetapan SK serta penyaluran bantuan PIP belum sesuai nilai yang ditetapkan. Akibatnya, tujuan PIP untuk meningkatkan akses pendidikan menjadi terhambat dan dana PIP yang bertujuan meringankan biaya personal peserta didik tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut terjadi karena perumusan anggaran PIP belum memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya, Kemendikbud belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam perumusan *unit cost* pendanaan PIP, dan penetapan SK penerima PIP belum memperhatikan perubahan jumlah kebutuhan sesuai hasil pendataan yang terkini.

Adapun dari segi ketepatan waktu, penetapan dan penyaluran dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian reko-



Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atas angka alokasi BOS yang telah diajukan oleh Kemendikbud.

mendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu. Akibatnya, sekolah tidak dapat segera memanfaatkan dana BOS guna membiayai kebutuhan operasional sekolah. Hal tersebut terjadi karena direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) kurang optimal dalam menjalankan fungsi monitoring pengelolaan dana BOS di daerah.

Permasalahan ketepatan waktu lainnya, bantuan PIP belum sepenuhnya diterima oleh peserta didik untuk memenuhi biaya personal pada saat dibutuhkan. Kemendikbud belum memiliki pedoman tentang penentuan batas waktu pengelolaan (pengusulan, penetapan, penyaluran, pencairan) dana PIP. Akibatnya, antara lain, dana PIP yang bertujuan untuk meringankan biaya personal peserta didik pada saat dibutuhkan tidak dapat segera dimanfaatkan. Hal ini disebabkan antara lain karena Kemendikbud belum menyusun kajian tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP serta belum memiliki SOP tentang peran serta dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota maupun satuan pendidikan dalam setiap tahapan pengelolaan PIP yang dapat menjamin ketercapaian tujuan.

Ada juga permasalahan mengenai ketepatan sasaran dan penggunaan. BPK mencatat bahwa penggunaan dana BOS belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sebanyak 731 sekolah belum dapat memenuhi biaya operasionalnya dari dana BOS dan dana BOS tidak digunakan sesuai komponen pembiayaan yang diatur dalam Juknis BOS.

Dalam hal monitoring dan evaluasi, BPK menyatakan belum dilaksanakan secara me-

madai. Hal ini terlihat dari monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PIP belum dilakukan secara komprehensif dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi BOS dan PIP belum sepenuhnya dilaporkan secara berjenjang untuk diambil langkah perbaikan.

Beberapa rekomendasi BPK kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Ketepatan jumlah

- Menetapkan satuan biaya dana BOS dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah serta indikator ekonomi lainnya.
- Menginstruksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) agar menyusun kajian dan merumuskan pedoman tentang perhitungan *unit cost* kebutuhan PIP dalam klaster tertentu dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah dan indikator ekonomi lainnya.

2. Ketepatan waktu

- Menginstruksikan kepada Dirjen Dikdasmen untuk meningkatkan fungsi monitoring pengelolaan dana BOS di daerah dalam rangka memastikan pelaporan dan penyaluran dana BOS dilaksanakan tepat waktu.
- Menginstruksikan Kepala Balitbang untuk menyusun kajian dan merumuskan dalam pedoman tentang *strategic timeline* pengelolaan bantuan PIP (dari proses pengusulan sampai dengan pencairan) terutama penentuan waktu yang paling dibutuhkan oleh penerima sebagai acuan batas keterlambatan penyaluran.

3. Ketepatan sasaran dan penggunaan

- Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong pemda menganggarkan bantuan biaya operasional sekolah dalam APBD sebagai tambahan atas dana BOS dari pemerintah pusat serta melakukan program sosialisasi Juknis BOS yang efektif melalui saluran media elektronik sebelum pemberlakuan Juknis BOS.
- Menyempurnakan Juklak PIP yang memuat peran kepala sekolah, mekanisme verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data Basis Data Terpadu/Program Keluarga Harapan/Kartu Keluarga Sejahtera dengan Dapodik dan data sejenis lainnya, serta penyeragaman penggunaan *cut off* data, kriteria, dan perangkat dalam pengolahan data calon penerima PIP.



StockSnap - Pixabay

4. Monitoring dan evaluasi

- Menyempurnakan dan menetapkan SK tim BOS Kemendikbud dan menyempurnakan SK tim pengelola PIP Kemendikbud serta menyempurnakan juknis BOS dan juklak PIP dengan mengatur prosedur monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan terintegrasi, termasuk format pelaporan monitoring dan evaluasi dan penggunaan laman/media pengaduan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui Program BOS dan PIP dalam mewujudkan wajib belajar 12 Tahun mengungkapkan 8 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian

Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian tahun 2016-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Kemenag untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan penelitian pada PTKIN.

Kemenag telah menjadikan program/kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik (dosen) sebagai prioritas dengan adanya beasiswa program 5.000 doktor baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Kemenag pada tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat minimal sebesar 30 persen dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan Kemenag belum efektif dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian. Dalam hal peningkatan kualitas tenaga pendidik, sasaran penerima dan target beasiswa program 5.000 doktor tidak sesuai dengan sasaran penerima dan target program dalam rencana strategis (Renstra) Kemenag. Akibatnya, jumlah dosen sebagai target utama program beasiswa Program 5.000 Doktor yang meningkatkan kompetensinya menjadi S3 tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi karena Dirjen Pendis, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan Kepala Subdit Ketenagaan Diktis tidak konsisten menjalankan program peningkatan kompetensi yang ditujukan untuk dosen serta tidak mempedomani target RPJMN dalam menyusun Renstra Diktis.

Sedangkan untuk program peningkatan kualitas penelitian, ditemukan permasalahan yaitu pembagian alokasi anggaran penelitian pada PTKIN belum dilakukan secara transparan dan memadai. Tidak ada penetapan resmi atas metode/indikator yang digunakan oleh Ditjen Pendis dalam menentukan alokasi/perhitungan besaran anggaran penelitian untuk masing-masing PTKIN dan indikator penentuan nilai anggaran yang digunakan oleh Ditjen Pendis belum mempertimbangkan kebutuhan PTKIN dalam meningkatkan kualitas/kompetensi dosen dalam meneliti, kebutuhan peningkatan kualitas jurnal maupun penghargaan bagi peneliti/jurnal yang mampu meraih prestasi.

Rekomendasi BPK untuk Menteri Agama, agar memerintahkan Ditjen Pendis untuk:

- Menetapkan sasaran program 5.000 doktor hanya untuk dosen sesuai dengan renstra.
- Menetapkan pedoman pembagian alokasi BOPTN untuk penelitian bagi perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi peneliti maupun jurnal.

Hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan. ●

”

Kemenag telah menjadikan program/kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik (dosen) sebagai prioritas dengan adanya beasiswa program 5.000 doktor baik dalam maupun luar negeri.



pxhere.com

BPK Berbagi Ilmu di Kancah Internasional

BPK mendapatkan apresiasi dari banyak pihak atas kontribusinya membantu pengembangan kapasitas lembaga pemeriksa negara lain.

Kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin diakui di kancah internasional. Selain sering dipercaya menjadi pengurus organisasi internasional, BPK juga kerap berbagi ilmu dengan lembaga pemeriksa negara lain.

Pada awal April, tepatnya 8 April 2019, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif melakukan kunjungan ke kantor pusat National Audit Authority (NAA) of Cambodia, di Phnom Penh, Kamboja.

Ketua BPK dan Sekjen BPK melakukan *high level meeting* dan *courtesy call* dengan Auditor General of NAA, Som Kim Suor. Kunjungan ini merupakan implementasi kerja sama bilateral antara BPK dan NAA Cambodia yang telah berlangsung sejak penandatanganan MoU di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2010.

Dalam acara tersebut, Auditor General NAA Som Kim Suor memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi besar BPK dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia NAA, khususnya dalam pengembangan pemeriksaan kinerja, manajemen *training*, dan infrastruktur.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan. BPK pun diharapkan terus



■ Ketua BPK RI dan delegasi didampingi Dubes RI untuk Kamboja berfoto bersama Auditor General Audit Authority of Cambodia Mrs. Som Kim Suor.

menjadi mitra bagi pengembangan kapasitas institusi NAA.

Setelah *high level meeting*, acara dilanjutkan dengan *knowledge sharing* yang dihadiri 35 orang pejabat dan auditor senior di lingkungan NAA Cambodia. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal NAA Long Athibora dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atas dua topik, yaitu mengenai 'BPK's Performance Audit Guidelines' yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Kinerja I Nico Andrianto. Selain itu, BPK memaparkan materi perihal 'BPK's Training Management' yang disampaikan Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Hery Subowo.

Penguatan kerja sama dan *knowledge sharing* tak hanya dilakukan dengan Kamboja. Empat hari sebelum ke Kamboja, tepatnya pada 4 April 2019, Ketua BPK didampingi Sekjen BPK juga melakukan *high level visit* dan seminar bilateral di kantor pusat State Audit Organization (SAO) of Lao People Democratic Republic (PDR) di Vientiane, Laos.

Kegiatan tersebut merupakan implementasi kerja sama bilateral an-

tara BPK RI dan SAO Laos yang sudah berlangsung sejak penandatanganan MoU pada 2015.

Rangkaian acara *high level visit* dimulai dengan *courtesy call* antara Ketua BPK dan Vice Prime Minister of Lao PDR, Bounthong Chitany yang sekaligus merupakan Commitee Member of The Party Central Inspector dan President of State Auditor and a Central Leader of Anti Corruption of State Organization.

Pada kesempatan tersebut, BPK memperoleh apresiasi yang tinggi atas kontribusinya dalam pengembangan kapasitas institusi SAO Lao. Kerja sama dan sinergi yang baik antara kedua pihak diharapkan terus ditingkatkan sebagai upaya peningkatan kualitas pemeriksaan di kedua institusi.

Dalam kunjungan ke SAO Lao, delegasi BPK juga memberikan pelatihan kepada auditor di lingkungan SAO Lao PDR. Ada dua topik yang disampaikan. Topik pertama mengenai 'Follow Up the Recommendation of Audit Finding' yang disampaikan Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Selvia Vivi Devianti. Adapun topik kedua yakni 'Risk Based Approaches Audit' dipaparkan Kepala Auditorat Keuangan Negara II.B Beni Ruslandi. ●

Ketua BPK Paparkan Hasil Pemeriksaan IAEA

Negara-negara anggota mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan tanggapan positif atas temuan serta rekomendasi yang diberikan.



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara memaparkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja International Atomic Energy Agency (IAEA) Tahun 2018 dalam sidang Programme and Budget Committee (PBC) 2019 di Wina, Austria, Senin (6/5). Sidang PBC tahunan tersebut dihadiri perwakilan dari kurang lebih 171 negara anggota dan dipimpin oleh Leena Al-Hadid sebagai Chair of Board of Governors of IAEA 2018-2019.

Moermahadi menyampaikan, BPK

dalam melakukan pemeriksaan berpedoman pada International Standards on Auditing (ISA) untuk Pemeriksaan atas Laporan Keuangan IAEA Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan keyakinan independen secara memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang dapat disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan. Tujuan tersebut telah tercapai, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama 2018, Badan Energi Atom Internasional tersebut menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan belanja masing-masing sebesar Rp9,36 triliun

dan Rp8,98 triliun serta mengelola aset dan hutang masing-masing sebesar Rp18,78 triliun dan Rp9,49 triliun.

Sedangkan pemeriksaan kinerja berpedoman pada International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen program IAEA untuk meningkatkan layanan kepada negara anggota. Dalam hal ini, IAEA telah berhasil melaksanakan sistem dan proses pemenuhan area kunci pemeriksaan, yaitu manajemen pengadaan barang dan jasa serta publikasi terkait departemen teknis yang mengelola fungsi kenukliran

beserta kerja sama teknisnya sebagai salah satu proses strategis yang dapat memberikan manfaat kepada negara anggota.

Walaupun IAEA berhasil meraih opini WTP dan melaksanakan manajemen program menggunakan pendekatan hasil secara memadai, Ketua BPK memberikan beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan oleh manajemen untuk tata kelola IAEA. Beberapa catatan itu antara lain, IAEA harus meningkatkan *anti-fraud policy* untuk mempromosikan budaya organisasi yang etis. Selain itu, harus memperbarui dan meninjau pedoman kebijakan IPSAS dan petunjuk teknis keuangan secara teratur untuk merespons dengan lebih baik lingkungan entitas yang kemungkinannya tidak pasti dan tidak dapat diprediksi.

Adapun, perbaikan yang perlu dilaksanakan pada pemeriksaan kinerja antara lain membangun koordinasi yang lebih intensif dengan negara-negara anggota. Hal ini penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya dukungan solid negara anggota. Kemudian, dibutuhkan komitmen kuat untuk memastikan proses dan pengiriman pengadaan yang tepat waktu, efisien, dan efektif.

Negara-negara anggota secara



umum mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan tanggapan positif atas temuan serta rekomendasi yang diberikan. Mereka akan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk memperbaiki tata kelola organisasi secara internal dan meningkatkan pelayanan kepada negara anggota.

IAEA memiliki 11 negara anggota, yaitu Mesir (mewakili G-77), Rumania (mewakili Uni Eropa), Jepang (yang mendukung secara langsung pencalonan BPK sebagai External Auditor IAEA 2020-2021), Chile, Kanada, India, Cina, Filipina, Kolombia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Mereka

mengemukakan secara langsung keberhasilan BPK memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Ketua BPK menutup sesi tersebut dengan mengucapkan terima kasih atas harapan dan kepercayaan yang sudah diberikan selama ini.

Hal lain yang ditegaskan Ketua BPK dalam pidatonya tersebut adalah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya yang harus dipenuhi secara saksama dan tepat waktu sehingga menjaga keberlangsungan proses bisnis guna pencapaian tujuan organisasi. Sebelum sidang PBC, pada 3 Mei 2019 delegasi BPK juga bertemu langsung dengan Chair of Board of Governors. Ketua BPK menyampaikan rencana lingkup pemeriksaan BPK atas LK dan Kinerja IAEA tahun 2019 dan hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan terhadap tata kelola.

Ketua BPK menghadiri sidang PBC didampingi oleh Sekjen BPK, Bahtiar Arif sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan. Selain itu, didampingi Nanik Rahayu serta I Gede Sudi Adnyana yang masing-masing sebagai Pengendali Teknis Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja, serta Firdaus Amyar Kepala Bagian Sekretariat Ketua, dan Naomi Simamora dari Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. ●



■ Ketua BPK, Sekjen BPK, dan auditor IAEA bersama Chair on Board of Governors IAEA, Ms. Leena Al-Hadid.

BPK-ANAO Saling Membantu Tingkatkan Kapasitas



■ Anggota V BPK dan Delegasi BPK berfoto bersama AG for Australia, Deputy AG for Australia, dan Pejabat ANAO.

ANAO mengaku kagum atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja tematik dana desa yang dilakukan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan Australian National Audit Office (ANAO) menyelenggarakan *Senior Management Dialogue* (SMD) di kantor ANAO, Canberra, Australia, 30 April-1 Mei 2019. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi.

Delegasi BPK dipimpin Anggota V BPK Isma Yatun. Ada berbagai topik yang dibahas dalam SMD tersebut, yaitu peran manajer senior dalam pemeriksaan kinerja, *long form audit reporting*, manajemen risiko, dan indikasi kecurangan dalam pemeriksaan.

Anggota V BPK Isma Yatun saat *courtesy meeting* dengan Auditor General for Australia Grant Hehir dan Deputy Auditor General for Australia Rona Mellor menyatakan apresiasinya atas kerja sama kedua institusi yang telah berjalan selama tiga belas tahun. "Kami berharap kerja sama dapat di-

lanjutkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing," kata Isma Yatun.

Sementara itu, Grant Hehir mengaku kagum atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja tematik dana desa yang dilakukan BPK. Menurut dia, BPK berhasil mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan yang melibatkan banyak tim dan dilakukan pada seluruh perwakilan.

Ia mengatakan, ANAO memiliki kegiatan pemeriksaan serupa, namun dengan lingkup yang lebih kecil. Melalui SMD ini, masing-masing institusi dapat belajar dari pengalaman pemeriksaan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaannya.

ANAO, kata dia, juga ingin belajar dari pengalaman BPK dalam pemeriksaan terhadap indikasi kecurangan. Sebab, saat ini ANAO belum melaksanakannya.

Setelah berkunjung ke ANAO, delegasi BPK kemudian melanjutkan rangkaian acara SMD ke kantor the Audit Office of New South Wales, Sydney, pada 2 Mei 2019. Selain untuk memonitor perkembangan kegiatan *secondment* pemeriksaan keuangan yang diikuti pegawai BPK di sana, SMD tersebut bertujuan mendiskusikan isu-isu terkait *contracting audit*.

Ini bukan pertama kali BPK menggelar SMD dengan ANAO. Kegiatan serupa pernah digelar pada 12-13 September 2018 di kantor pusat BPK RI, Jakarta. Kala itu, topik utama yang dibahas adalah Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Kinerja.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan salah satu implementasi kerja sama BPK-ANAO untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kinerja BPK sebagai salah satu strategi mencapai visi BPK dalam Renstra 2016-2020, yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. ●



■ Foto bersama Anggota V BPK dan Delegasi BPK dengan AG for New South Wales, Margaret Crawford, dan Pejabat Audit Office of NSW.

BERNARDUS DWITA PRADANA,
STAF AHLI BPK BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Tantangan Adalah Kesempatan

Tantangan bukanlah halangan. Sebaliknya, tantangan jadi kesempatan memacu diri untuk dapat melangkah jauh ke depan. Prinsip itu yang dipegang Bernardus Dwita Pradana selama mengabdikan diri di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Memulai karier di BPK sebagai administrasi umum pada 1990, Dwita hanya butuh waktu delapan tahun untuk bisa *go international* dengan menjadi *training specialist* untuk melatih tim-tim pemeriksa dari negara-negara ASOSAI atau Asosiasi Lembaga Pemeriksa se-Asia. Sejak itu, kariernya terus melesat hingga akhirnya ia sekarang dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko.

Kepada *Warta Pemeriksa*, pria kelahiran Yogyakarta, 6 September 1967 itu membagikan kisah dan kiat-kiatnya dalam menjalani setiap amanah yang diberikan BPK. Berikut petikan wawancaranya.



■ Bernardus Dwita Pradana, Staf Ahli BPK Bidang Manajemen Risiko

Sebelum berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan kemudian bekerja di BPK, bapak sempat bersekolah pastur. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan karier bapak hingga akhirnya memilih mengabdikan diri di BPK?

Setelah saya lulus SMA seminari tahun 1987, memang saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan sebagai pastur walaupun saya lulus masuk di salah satu novisiat. Ada banyak pertimbangan. Saya merasa diri saya perlu hidup dulu dalam dunia kehidupan yang nyata. Saat itu, setelah lulus, ada 2 pilihan. Yaitu masuk teknik nuklir melalui jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan STAN. Saya putuskan masuk STAN saja dengan segala pertimbangan. Antara lain, karena yang pertama kuliah di STAN itu beasiswa. Saya bisa meringankan beban orang tua

karena orang tua saya adalah dosen negeri. Kemudian, ada jaminan setelah lulus langsung dapat pekerjaan. Alasan ketiga, saat itu saya berharap mudah-mudahan bisa bekerja di Jakarta yang memiliki dinamika kehidupan yang lebih kompleks dan menantang.

Pada tahun kedua kuliah di STAN, yaitu tahun 1989, saya mendapatkan tawaran apakah mau masuk BPK, BPKP, atau Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan-red) yang ada saat itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Saya putuskan memilih BPK karena di BPK saat itu baru angkatan kedua. Selain itu, saya mendapatkan informasi bahwa BPK memberikan kesempatan besar bagi pegawainya untuk berkuliah di luar negeri dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saat itu saya CPNS golongan IIA.

Setelah lulus D3 dari STAN, saya masuk ke BPK tahun 1990 sebagai administrasi umum dan tak lama kemudian ikut pendidikan penilik, 1991 sudah menjadi penilik. Pada waktu itu saya langsung masuk di Oditorat H yang kala itu membidangi Departemen Dalam Negeri untuk pemeriksaan APBN, kemudian untuk pemeriksaan APBD-nya di Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, serta BUMD yang terkait.

Pada periode 1991 sampai dengan 2000 saya masih berkecimpung di Oditorat H yang kemudian namanya berganti menjadi Auditorat H di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV. Tapi waktu itu masih membidangi pemerintahan daerah dan sebagainya. Dalam kurun waktu itu banyak sekali hal yang saya alami. Selain saya memeriksa di AKN IV, saya juga diminta bantuan untuk memeriksa di AKN yang lain, baik itu untuk memeriksa BUMN dan sebagainya.

Pada 1991, saat itu sedang marak atau sedang gencar-gencarnya pemeriksaan berbasis komputer (EDP Audit). BPK dan BPKP bekerja sama mengembangkan pelatihan dan pemeriksaan TI. Saya kemudian bergabung dalam pendidikan dan pelatihan EDP Audit secara berjenjang di Jakarta, Malaysia, dan Canada.

Lulusan STAN biasanya sangat dicari perusahaan. Apakah bapak pada awal-awal tahun bekerja sempat mendapatkan tawaran dari perusahaan swasta?

Di awal-awal bekerja saya sempat berpikir karena banyak teman-teman yang masuk BPK, lalu keluar. Ada yang pindah ke Pertamina, ada yang di perusahaan swasta, dan sebagainya. Awal-awal saya masih *nyambi* (*part time*). Sepulang bekerja di BPK, saya membantu suatu perusahaan di kawasan Tanah Abang untuk membuat laporan keuangan dan mengurus pajaknya. Namun dengan berbagai kesibukan, saya tidak melanjutkan pekerjaan sampingan karena banyak penugasan ke luar kota. Saya juga sempat melamar di salah satu bank nasional dan juga diterima masuk di sana. *Take home pay*



Tahun 1998 adalah salah satu momen yang termasuk besar bagi saya. Karena pada tahun itu pimpinan BPK menugaskan saya untuk ikut dalam program IDI-ASOSAI Training Specialist selama kurang lebih 4 bulan.

yang ditawarkan jauh lebih besar dari yang saya dapatkan di BPK. Namun, saya tidak mengambil tawaran itu.

Apa yang membuat bapak memilih tetap bekerja di BPK saat itu?

Bangga sebagai pegawai BPK. Saat itu saya juga berpikir, 'waduh kalau saya masuk di perusahaan swasta bagian internal audit di bank, pasti pulangnye malam. Saya tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri.' Saya sudah membiasakan diri dengan pola bekerja di instansi pemerintah. Kemudian pada 1994-1996 saya mengambil S1 Akuntansi atas seizin BPK. Gelar sarjana itu tentu menambah kapasitas saya dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Menurut bapak, momen besar apa yang menjadi batu loncatan bapak saat merintis karier di BPK?

Puji Tuhan, tahun 1998 adalah salah satu momen yang termasuk besar bagi saya. Karena pada tahun itu pimpinan BPK menugaskan saya untuk ikut dalam program INTOSAI Development Initiative-Asian Organization of Supreme Audit Institutions (IDI-ASOSAI) Training Specialist selama kurang lebih 4 bulan. Dan sejak itu, saya menjadi salah satu *training specialist* yang sering mendapat penugasan untuk melatih tim-tim pemeriksa dari negara-negara ASOSAI. Puji Tuhan, semua biaya yang dikeluarkan itu ditanggung oleh IDI-ASOSAI sehingga tidak membebani APBN. Di situ saya belajar banyak mengenai praktik atau mandat pemeriksaan dan model pelatihan untuk para pemeriksa dengan tiga pendekatan kontemporer yang sejak itu juga sudah diterapkan di BPK maupun

SAI (lembaga pemeriksa negara) lain, yaitu *andragogy*, *experiential learning*, dan *systematic approach to training*.

Sampai sekarang pun saya masih tercatat sebagai *training specialist*. Namun, dengan semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab, tidak semua bisa saya penuhi. Sekarang lebih dominan ke sini. Karena pada waktu itu saya masih sebagai pemeriksa masih belum memegang jabatan struktural, jadi masih banyak kesempatan untuk membantu melakukan pengajaran di luar negeri.

Kemudian pada 2001-2003, saya melanjutkan studi S2 di bidang *E-Commerce* di University of Melbourne. Kala itu pimpinan memberikan arahan kepada saya kalau bisa saya ambil *e-government* karena *e-government* dalam beberapa tahun ke depan saat itu mulai *booming* atau mulai muncul. Tapi saat saya mencari, *e-government* kok belum ada yang *ketemu*. Akhirnya saya ambil *e-commerce* dulu di Australia. Saya kembali dari Australia pada 2003. Pada 2004-2006, saya mendapat kepercayaan menjadi Kasubag Kurikulum Sistem dan Metode di Pusdiklat BPK.

Berarti saat itu bapak untuk pertama kalinya bekerja di bidang nonpemeriksaan?

Iya nonpemeriksaan. Tapi, saya juga masih dilibatkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan, masih diperbantukan. Pada saat yang bersamaan, pada 2004 *kan* waktu itu terjadi musibah tsunami Aceh. Banyak sekali bantuan-bantuan luar negeri. BPK pun didorong untuk melakukan sesuatu.

Saya ingat sekali, saat itu Pak Anwar Nasution (mantan ketua BPK), ketika terjadi musibah tsunami, beliau



■ Bernardus Dwita Pradana saat Pelantikan Eselon I.

langsung terbang ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan SAI dari negara lain dan membahas apa yang bisa dilakukan lembaga pemeriksa negara. Awal Januari 2005, kita melakukan konferensi internasional dengan negara-negara yang *concern* dengan tsunami. Intinya, saat itu dengan banyaknya bantuan yang berdatangan, kita sepakat bahwa harus juga ada transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai ada penyalahgunaan dan sebagainya. Sehingga banyak negara-negara yang akan membantu BPK.

Nah, saat itu, selain menjadi Kasubag KSM, saya mendapat tugas tambahan untuk mengelola bantuan dari lembaga-lembaga donor seperti ADB, AUSAID, USAID, dan lainnya. Pada saat itu juga, untuk pertama kalinya BPK mengembangkan teknologi GIS dan GPS untuk melakukan pemeriksaan bencana.

Pada 2006-2007, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Kabag Hubungan Antar Lembaga. Pada waktu itu, BPK sedang melakukan restrukturisasi organisasi, termasuk di lingkungan Biro Humas yang kemudian menjadi Biro Humas dan Luar Negeri.

Ketika Biro Humas dan Luar Negeri terbentuk, pada 2007-2008 saya menjadi Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang pertama dalam struktur organisasi BPK yang baru. Saya mendapat tugas untuk membangun kerja sama luar negeri, bilateral, multilateral dan menguatkan peran BPK dalam organisasi ASOSAI dan INTOSAI. Kita me-

letakkan dasar-dasar kerja sama luar negeri BPK, termasuk membangun sistem, *template*, dan sebagainya.

Kemudian di 2008-2010 saya mendapat kepercayaan menjadi Kepala Biro Humas dan Luar Negeri yang saya rasa tugasnya luar biasa berat, yaitu menjalankan fungsi kehumasan dan menjalin hubungan luar negeri. Waktu itu sempat terpikirkan agar kedua ini dipisahkan, namun dengan beberapa pertimbangan, tak jadi dipisahkan. Hari demi hari saya amati semakin banyak tugas, humas itu kerjanya 24 jam, urusan luar negeri juga 24 jam karena ada perbedaan waktu dengan mitra luar negeri.

Tapi puji Tuhan, berkat arahan dan bimbingan pimpinan, serta dukungan teman-teman, semua berjalan lancar. Pada 2010, IDI merekrut saya. BPK merestui permintaan IDI dan menugaskan saya bekerja di IDI, Oslo, Norwegia, hingga 2012. Di sana tugas saya ada dua, yaitu sebagai Program Manager yang menangani Transregional Capacity Building Program dan Program Manager Knowledge Management. Yang pertama saya bertanggung jawab mendesain, mengembangkan, dan melaksanakan program pengembangan kapasitas di bidang pemeriksaan antara lain *public debt management audit* dan *forest audit* bagi SAI negara-negara berkembang yang pesertanya lebih dari satu regional, makanya namanya Transregional. Waktu itu yang *forest audit* ada 15 negara. Saya membantu 15 tim dari 15 negara untuk membangun kapasitas

di lingkungan mereka. Programnya itu sekitar 2 tahun. Kita membantu membangun program pemeriksaan, pelaksanaan supervisi, kemudian pelaporan pun kita membantu menyusunnya sampai menyusun praktik-praktik terbaik pemeriksaan.

Untuk yang *public debt management audit*, kalau tidak salah ada 60-an negara, tapi dibagi dua kelompok, yang satu mereka yang berbahasa Inggris yang satu Bahasa Prancis. Ini merupakan program terbesar saat itu. Selain jumlah negara, jangka waktu program 3 tahun termasuk dengan *e-learning platform*, melibatkan tim *expert* dari berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNCTAD, UNITAR, INTOSAI, dan sebagainya.

Selama di IDI, atas izin pimpinan, saya juga melibatkan peran BPK dalam program IDI, antara lain sebagai *host*, peserta, instruktur, narasumber, dan sebagainya.

Setelah dari Norwegia, bapak bertugas di mana?

Setelah itu, tepatnya pada 2012, saya kembali ke Indonesia. Selama tiga bulan saya ditempatkan di AKN III membantu dalam piloting GTMP (Gugus Tugas Manajemen Pemeriksaan). Ini adalah suatu fungsi sekretariat AKN yang mengelola sumber daya pemeriksaan dan membantu koordinasi pemeriksaan antar auditorat maupun membantu memfasilitasi pemeriksaan tematik.

Berkat kerja keras bapak di dalam negeri dan internasional, bapak kemudian dipercaya menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT. Bisa diceritakan bagaimana tantangannya menjadi kepala perwakilan di sana? Program apa saja yang bapak jalankan?

Saya mendapat kepercayaan menjadi Kepala Perwakilan di NTT pada periode 2012-2014. Yang jadi salah satu tantangan saat itu adalah *leadership* saya diuji dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dari tahun ke tahun semakin menurun.

Saat saya masuk ada sekitar 100 orang pegawai. Setahun berjalan berkurang menjadi 80 orang, tahun berikutnya berkurang lagi menjadi 60 orang. Sementara, jumlah entitas cukup banyak, yaitu 22 dan meningkat menjadi 23. Perlu strategi baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Kami saat itu membuat program Road to WTP. Setidaknya ada 10 langkah menuju WTP dengan melibatkan pemda, DPRD, dan BPKP. Salah satu langkahnya adalah entitas harus memiliki SDM yang terampil dalam pencatatan akuntansi.

Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM di BPK NTT, kami ikut menerapkan teknologi *e-audit*. Kami melakukan *profiling maturity* TI dan pendekatan audit terhadap 22 entitas yang ada pada waktu itu. Saat itu BPK NTT mendapatkan apresiasi dari pimpinan sebagai satker perencanaan *e-audit* yang terbaik di BPK.

Bapak bertugas di NTT tak lama setelah pulang dari Norwegia. Bagaimana bapak beradaptasi dengan perbedaan kondisi antara Norwegia dan NTT?

Waktu itu memang banyak yang bertanya, orang yang dari Norwegia kok ditempatkan di NTT. Saya selalu melihat sisi positif. Pasti ada maksud pimpinan dan lembaga menugaskan saya ke sana, mungkin karena di Norwegia saya mendapatkan bekal baik dalam mengelola pekerjaan. Saat di Norwegia, sumber daya manusia juga terbatas. Saya hanya punya satu staf. Jadi, puluhan negara yang waktu itu saya pegang di Norwegia ya diurus oleh saya dan satu staf saya tersebut. Pengalaman saya itu yang mungkin menjadi pertimbangan pimpinan dan lembaga menugaskan saya ke NTT yang memiliki jumlah SDM terbatas.

Pada intinya, kita harus selalu berpikir positif. Saya pun berpesan kepada teman-teman bahwa, pertama di manapun kalian ditempatkan, itu adalah hal yang harus kamu lihat sebagai kepercayaan, amanah, dan hal yang

positif. Di situ pasti ada tantangan, tapi jangan dihindari. Kedua, di manapun kamu ditempatkan, sejak saat itu juga riwayat di CV kalian akan bertambah. Kita harus melakukan yang terbaik. Bisa membalikkan tantangan menjadi kesempatan.

Ada pepatah Jawa 'wang sinawang'. Di manapun kita bekerja pasti ada plus dan minusnya, dan itu tergantung pada diri kita sendiri dalam menyikapinya. Semuanya indah jika kita memiliki *passion*, bekerja dengan hati dan ikhlas.



Di manapun kita bekerja pasti ada plus dan minusnya, dan itu tergantung pada diri kita sendiri dalam menyikapinya.

Setelah dari NTT, saya dipercaya menjadi Kepala Direktorat Litbang pada Ditama Revbang. Itu tahun 2014-2015. Di situ saya merasakan betapa menantang tugas dan fungsi litbang. Kemudian 2015-2019, saya dipercaya menjadi Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan di Itama sebelum akhirnya diangkat menjadi Staf Ahli Manajemen Risiko sampai saat ini.

Bagaimana kiat-kiat bapak dalam menjalani setiap amanah yang diemban?

Berdasarkan berbagai amanah dan pengalaman yang pernah saya alami, kita harus memegang teguh nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Kita harus bisa membedakan antara tugas dan solidaritas. Maksudnya, kalau memang sudah saatnya menjalankan tugas, ya

jalankan tugas itu.

Hal yang tak kalah penting adalah kita harus memiliki sikap respek dan bertanggung jawab. Kita mesti menghargai setiap orang. Karena jika kita menghargai orang lain, orang itu pasti juga akan menghargai pekerjaan kita. Tapi, menurut saya, yang paling utama yaitu loyal pada lembaga dan pimpinan di manapun kita berada dan ditugaskan. *Last but not the least* adalah dukungan keluarga.

Sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, apa saja yang menjadi tugas bapak?

Tugas Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko ada dua, yaitu melakukan kajian mengenai kebijakan yang terkait dalam bidang manajemen risiko dan memberikan masukan kepada BPK mengenai strategi penerapan manajemen risiko dalam kelembagaan BPK.

Selain itu, saya membantu memberikan masukan sesuai permintaan satker lainnya sesuai kebutuhan dan kompetensi serta melaksanakan tugas-tugas sesuai arahan pimpinan dan Badan. Sesuai kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko, saya juga terlibat dalam Komite Pelaksana Manajemen Risiko membantu Kaditama Revbang.

BPK saat ini sedang mengimplementasikan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko. Jadi, tugas saya adalah memberikan kajian penerapan manajemen risiko berdasarkan strategi yang sudah ada. Karena pimpinan sudah menyetujui strategi tersebut, saya akan meneruskan sekaligus melakukan evaluasi untuk penerapan dan penyempurnaannya. Kemudian, kita perlu fokus pada risiko operasional. Kita akan memetakan risiko operasional yang ada dan berpotensi terjadi di setiap satker. Setelah risiko operasional, yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan berbagai sistem manajemen di BPK ke dalam sistem manajemen risiko yang kita punya untuk membantu pencapaian tujuan BPK. ●



Direktorat Jenderal Pajak
Kanwil DJP Jakarta Pusat
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga

TAXPAYER AWARDS 2019

Diberikan Kepada :

BENDAHARA PENGELUARAN BPK RI

NPWP 00.012.137.6-077.000

sebagai:

WAJIB PAJAK BENDAHARA

dengan Kontribusi Penerimaan dan Kepatuhan Pelaporan Terbaik
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2018

Jakarta, 2 April 2019

Kepala KPP

Mokhamad Khifni



KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA

TAXPAYER AWARDS 2019

Diberikan kepada :

BENDAHARA PENGELUARAN BPK R.I.

KATEGORI :

Wajib Pajak Bendahara
Kontribusi Pembayaran dan
Kepatuhan Pelaporan Terbaik

DIDIK SUHARDI, SEKRETARIS JENDERAL KEMENDIKBUD

Pemeriksaan BPK Sangat Bermanfaat Bagi Dunia Pendidikan



■ Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud

Warta Pemeriksa mendapatkan kesempatan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) Didik Suhardi seputar dunia pendidikan di Tanah Air. Ia bercerita banyak mengenai langkah-langkah Kemendikbud memajukan pendidikan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dalam sesi wawancara yang berlangsung pada 10 Mei 2019 ini, Didik pun menanggapi berbagai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK terkait pendidikan. Berikut petikan wawancaranya:

Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei. Bagi Kemendikbud, apa makna yang bisa dipetik dari Hardiknas pada tahun ini?

Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun masyarakat pendidikan selalu merayakan Hari Pendidikan Nasional. Tentu ini sangat bermakna bagi insan pendidikan karena hari itu adalah hari yang selalu diperingati dan tentu peringatan ini bukan sekadar perayaan. Peringatan ini harus memberikan makna bahwa setiap Hari Pendidikan Nasional kita perlu meningkatkan kinerja kita dari tahun sebelumnya. Itu salah satu hal yang penting.

Dengan demikian, Hardiknas menjadi bermakna. Oleh karena itu, kami di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tiga tahun yang lalu sudah melakukan sinergi antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadikan Hari Pendidikan Nasional sebagai sarana untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi itu misalnya dilakukan untuk mengetahui di area-area mana kita sudah mencapai kualitas yang diinginkan. Kemudian di area mana kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tentu ini adalah sebuah proses yang kita sebut namanya *never ending business* karena urusan pendidikan memang suatu proses dimana kita harus memberikan pendidikan pada anak-anak kita agar mereka siap untuk hidup pada saat zamannya. Itu yang penting. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengantisipasi, memprediksi proses pembelajaran, proses pengalaman belajar yang harus dipunyai anak-anak kita.

Jangan sampai kita membuat kurikulum tak *up to date*. Kita melakukan proses belajar mengajar. Sebetulnya proses belajar mengajar ini sudah ketinggalan, kita melakukan pembinaan guru yang sebetulnya ada metode-metode yang lebih *up to date* dibandingkan apa yang kita lakukan. Itu hal-hal yang harus kita evaluasi setiap tahun, sehingga itu betul-betul yakin bahwa Hari Pendidikan Nasional membawa makna bahwa pendidikan dan kebudayaan semakin tahun harus semakin baik.

Pengembangan pendidikan di dalam negeri membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bagaimana Bapak melihat peran BPK sejauh ini dalam membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi terkait lainnya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan?

Jadi, peran BPK ini sudah kita ketahui bahwa BPK adalah salah satu pe-

meriksa eksternal. Tentu kami sangat terbantu karena dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK, kami jadi tahu di area mana kami perlu melakukan perbaikan, kemudian di daerah mana yang sudah dianggap baik proses penyelenggaraan pendidikannya.

Seperti kita ketahui, pemeriksaan pendidikan bukan hanya dilakukan dalam lingkup pemerintahan pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi juga ada di daerah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi pendidikan itu ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada yang dikelola oleh pemerintah daerah.



Dana besar kalau kualitas belanja jelek, ya memang tidak akan mendapatkan peningkatan kualitas pendidikan yang kita inginkan.

Seberapa besar porsi penyelenggaraan pendidikan yang dikelola pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud?

Jika ditinjau dari segi anggaran, Kemendikbud hanya mengelola sekitar 7 persen dari total alokasi anggaran pendidikan. Sebanyak 63 persen dikelola pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan baik itu dalam *kick-off meeting* maupun *entry meeting*, kita selalu menyampaikan agar pemeriksaan ini tidak berfokus di pusat, tapi juga termasuk di daerah. Sebab, anggaran kita ini *kan* banyaknya digelontorkan ke daerah dalam bentuk dana transfer, yaitu dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi

husus (DAK). Sehingga kami bisa tahu di area-area mana perlu perbaikan termasuk dalam hal kualitas belanja. Kualitas belanja ini sangat penting karena bagi kami, dana besar kalau kualitas belanja jelek, ya memang tidak akan mendapatkan peningkatan kualitas pendidikan yang kita inginkan.

Bagaimana upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK?

Alhamdulillah ya, Kemendikbud dalam lima tahun terakhir mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Harapan kami tahun keenam ini juga kita bisa mendapat opini WTP.

Bagi kami, opini WTP punya makna bahwa pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di kementerian kami semakin tahun, semakin baik. Dengan adanya sistem baru, yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual, lebih memudahkan untuk pelaporan. Karena pelaporan tahun ini dipertanggungjawabkan tahun ini juga. Saya kira ini bagus dan semakin baik pengelolaan keuangan kita. Tentu ini akan sangat berdampak pada kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 mengeluarkan laporan pemeriksaan kinerja terkait bantuan operasional sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian. Apa yang menjadi catatan Kemendikbud terhadap hasil pemeriksaan tersebut?

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bantuan operasional sekolah atau BOS itu merupakan salah satu komponen pembiayaan yang sangat penting dan utama. Kenapa saya bilang penting dan utama? Karena banyak sekolah itu dalam menyelenggarakan pendidikan mengandalkan dana BOS.

Perlu diketahui dana BOS ini bukan dikelola oleh pusat, tetapi ditransfer ke daerah. Dana BOS ini antara lain mencakup pembinaan profesionalisme guru, sehingga harapannya profesionalisme guru itu tidak mengandalkan dari pusat, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.

Pengelolaan dana BOS dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun ini sudah hampir Rp53 triliun. Tahun depan akan naik lagi. Nah, tentu kenaikan anggaran dana BOS ini bukan berarti kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dana ke sekolah itu harus dikurangi, tidak seperti itu. Ini justru harus lebih bersinergi. Hanya yang jadi persoalan, di daerah itu ada kecenderungan semakin banyak dana transfer dari pusat digelontorkan ke daerah, justru ada daerah-daerah yang mengurangi anggaran dari APBD murni. Ini jadi persoalan.

Apa dampaknya bagi dunia pendidikan dengan adanya persoalan tersebut?

Akibatnya, pendidikan itu bukan menguat, justru makin berkurang karena dana yang ditransfer dari pusat sudah diprogramkan untuk program-program yang sifatnya spesifik. Jadi, program-program strategis nasional yang tidak bisa dibiayai oleh daerah, ada dana transfer dari pusat.

Tapi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya beban, harus tetap menjadi bagian dari belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi, sebenarnya tidak ada rumus ketika dana transfer daerah semakin banyak, kemudian dana dari pemda dikurangi. Tidak ada cerita seperti itu. Karena itu, penggunaannya beda-beda, tujuannya beda-beda. Dana transfer untuk membiayai hal-hal yang sifatnya program nasional dan strategis. Sedangkan daerah memang dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai hal-hal yang memang sudah tetap dan menjadi kegiatan rutin.

Sehingga ini adalah sesuatu yang sebetulnya komplementer, bukan

substitusi. Karena komplementer tentu harus saling melengkapi. Kalau substitusi itu seolah-olah dana dari pusat itu menutupi dana daerah.

Apa yang akan dilakukan Kemendikbud untuk mengatasi persoalan tersebut?

Saya kira harus ada edukasi kepada pemerintah daerah bahwa ke depan, komitmen pengelolaan pendidikan harus semakin baik. Selain itu, harus menindaklanjuti pemeriksaan BPK terhadap pengeluaran dana BOS. Memang perlu ada perbaikan-perbaikan, terutama kualitas *spending* tadi.

Harapan kami kualitas belanja harus ditingkatkan lagi. Hal ini bisa diperbaiki dan kita sudah menerapkan model transaksi nontunai yang ini kita gunakan bertahap. Nontunai ini sudah kita gunakan sejak 2017 dan kita *pilot* di beberapa sekolah. Harapannya, pengelolaan dana BOS semakin transparan, semakin akuntabel, dan kualitas belanjanya semakin bagus.

Mengatasi pengangguran masih menjadi tantangan bagi pemerintah meskipun jumlahnya cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Banyak lulusan sarjana yang menganggur karena tidak terserap oleh dunia kerja. Apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para pelajar sehingga memiliki daya saing?

Kemendikbud memang menjadi salah satu kementerian yang mempersiapkan sumber daya manusia di Indonesia. Kita selalu melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis, termasuk memfasilitasi sehingga daerah betul-betul mampu mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi dunia global untuk menghadapi pasar kerja. Sehingga, mereka ketika lulus langsung tertampung di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja.

Persoalannya, sekolah-sekolah kita ini masih banyak yang jurusannya itu sudah jenuh. Contohnya adalah

jurusan administrasi, jurusan manajemen yang ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). Lapangan pekerjaan untuk kedua jurusan itu sudah jenuh. Karena jurusan ini tidak dari SMK pun bisa bekerja di situ. Sehingga kita minta kepada mereka agar jurusan-jurusan itu segera dikonversikan, misalnya sesuai arahan Pak Presiden Jokowi untuk membuat jurusan logistik, serta jurusan industri retail.

Jurusan-jurusan itu diperlukan karena memang ini adalah jurusan-jurusan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Lapangan kerja logistik itu *kan* sekarang sudah luar biasa. Apalagi, sekarang niaga daring sangat berkembang pesat.

Barang yang dibeli konsumen melalui *e-commerce* itu *kan* harus tetap diantarkan. Nah, jurusan-jurusan ini yang memang kita kira perlu dibuka. Kami sudah meminta kepada sekolah-sekolah, kepada pemerintah daerah agar segera mengevaluasi jurusan-jurusan yang sudah jenuh. Kalau bisa ditutup dan diganti dengan jurusan lain. Sehingga, anak-anak kita ketika lulus betul-betul siap ditampung di dunia kerja.

Apa harapan Kemendikbud kepada BPK dalam mengawal penyelenggaraan pendidikan di Tanah Air?

Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BPK selama ini. Karena kami selalu mendapatkan hasil pemeriksaan yang selalu bisa kami tindak lanjuti. Pemeriksaan BPK sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Tentu ke depan, kami berharap temuan-temuannya semakin sedikit. Artinya, kapasitas kami untuk mengelola keuangan maupun aset semakin baik.

Kami juga berharap temuan-temuan yang sifatnya material semakin turun atau bahkan tidak ada. Sehingga, kami sangat membutuhkan peran BPK dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan, utamanya semakin memperbanyak pemeriksaan kinerja. Dengan begitu, pemeriksaan sifatnya lebih kualitatif, bukan hanya kuantitatif. ●

Perjuangan Menuntut Ilmu di Negeri Orang

BPK memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



■ Bersama mahasiswa Indonesia memperingati Hari Batik pada 2014.

Bisa mengenyam pendidikan di luar negeri merupakan impian banyak orang. Namun, untuk bisa menetap dan nyaman di negara orang bukanlah perkara mudah. Maklum, setiap negara memiliki tradisinya masing-masing dan hal lain yang bisa saja sangat berbeda dengan kondisi di negeri sendiri.

Hal itu seperti yang dirasakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Asrarul Rahman. Ia menemui begitu banyak tantangan saat men-

dapatkan kesempatan dari BPK untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Akan tetapi, tak sedikit pula hal menyenangkan yang menjadi pengalaman manis baginya.

Pria yang akrab disapa Asra itu menyelesaikan gelar D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2005 sebagai lulusan terbaik dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,58. Selang setahun, ayah dua anak itu meneruskan program D4 di kampus yang sama dan lulus pada 2008 dengan IPK 3,49.

Tidak puas dengan gelar D4, Asra

pada 2010 mengambil gelar Master of Business Information System Profesional, di Monash University, Victoria, Australia. Kepada *Warta Pemeriksa*, ia membagi kisah perjuangannya saat menjalankan program pendidikan di Australia.

Asra menceritakan, ia mendapat tantangan dari Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK untuk mengambil program S2 di luar ranah akuntansi lantaran sudah banyak SDM di BPK yang memiliki gelar master di bidang tersebut.

Bermodalkan nekat, Asra mengambil tantangan tersebut. Saat itu ia tertarik dengan perkembangan *data base* berbasis teknologi. Ia mengikuti beasiswa Australia Awards Scholarships (AAS) dan memilih jurusan Business Information System Professional di Monash University.

"Saya tertarik dengan *data base*. Ilmu yang saya dapat bermanfaat karena sekarang *kan* mengaudit harus mengerti *data base*," ujar Asra.

Di semester awal berkuliah, Asra harus beradaptasi dengan ilmu yang baru baginya. Bagaimana tidak, gelar D4 Akuntansi sangat bertolak belakang dengan program studi yang ia emban saat itu. Pelajaran mengenai informasi dan teknologi (IT) sangat asing baginya.

Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi masalah. Asra menjalani setiap proses belajar dengan penuh semangat dan optimisme. Kebetulan, ia memiliki teman satu jurusan (dari BPK) yang mengerti soal IT.

Ia banyak belajar dan berdiskusi dengan temannya tersebut. Berkat ketekunannya, ia berhasil lulus pada 2011 dengan IPK 3,69. "Kuncinya adalah konsisten, harus bisa memaksa diri sendiri. Akhirnya selesai juga ya dengan 'berdarah-darah', dua tahun *gak*

ada perpanjangan," pungkas Asra.

Cerita tentang riwayat pendidikan Asra berlanjut pada 2014. Bagi dia, salah satu pencapaian hidupnya adalah menempuh pendidikan setinggi mungkin. Asra mengambil gelar PhD in Accounting and Finance, di Adam Smith Business School, University of Glasgow, United Kingdom melalui program beasiswa pendidikan Indonesia yang difasilitasi Lembaga Pengelola



■ Bersama Supervisor Prof. John Mckernan (kiri) dan Prof. Greg Stoner (kanan), sesaat setelah Viva Voce (Sidang Akhir) PhD.

Dana Pendidikan (LPDP).

Tahun pertama di University of Glasgow tidak begitu mengembirakan baginya. Ia mengatakan, pendidikan doktor adalah level yang berbeda dengan level edukasi lainnya. "Studi lanjut di luar negeri tidak akan membuat kita pintar dengan sendirinya".

Ia menceritakan, tidak akan ada profesor atau teman yang akan meluangkan banyak waktunya untuk mengajarinya bidang ilmu tersebut. Bagaimana untuk bisa memahami bidang ilmu yang baru? Kuncinya, kata dia, hanya satu, yaitu belajar secara mandiri dan dengan tekad sekuat mungkin.

"Kalau bisa dibayangkan tahun pertama *tuh kayak* orang buta di dorong ke hutan. Terus cari jalan sendiri ke luar, sama sekali *gak* tahu apa-apa dan mau *ngapain*. Dapat SPV (profesor pembimbing) yang luar biasa sangat menginginkan kita independen, itu perjuangannya luar biasa sih menurut saya," ucap Asra.

Berkuliah di luar negeri juga menjadi tantangan tersendiri bagi seseorang yang sudah berkeluarga. Jika membayangkan keluarga, maka biaya hidup akan semakin besar. Namun, jika tidak, harus siap hidup terpisah dari keluarga.

Asra memilih opsi pertama. Ia nekat mengajak istri dan anaknya selama menempuh studi di luar negeri. Ia harus menanggung biaya hidup anak dan istrinya sendiri selama enam bulan pertama. Hal ini lantaran pihak pemberi beasiswa tidak menanggung biaya untuk keluarga selama enam bulan pertama.

"Saya nekat membawa keluarga dari bulan pertama dengan semua risiko di tanggung sendiri. Enam bulan pertama kami hidup serba *mepet* istilahnya. Harus benar-benar bisa menghemat pengeluaran. Alhamdulillah kami bisa melaluinya," kata Asra mengenang.

Konsekuensi lain yang harus ia hadapi adalah membagi fokusnya sebagai mahasiswa dan kepala keluarga. Ia melakukannya dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin saat ber-



■ Bersama teman-teman ketika wisuda S2, di Monash University.



■ Asrarur Rahman

ada di kampus sebagai mahasiswa dan saat di rumah sebagai kepala keluarga.

Walau aktivitasnya sebagai mahasiswa sangat padat, Asra tak meninggalkan waktu untuk bercengkerama dengan keluarga. Tugas mengantar anak ke sekolah tetap Asra lakukan. Menurutny, mengantar anak ke sekolah justru menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan dan bisa menghilangkan stres.

“Sekolah ke luar negeri bukan hanya gelar yang dibawa pulang, tapi *life experience*-nya juga. Kalau saya *enggak* sekolah di luar negeri, bahkan mungkin saya *enggak* sedekat itu sama anak-anak, itu yang paling saya syukuri,” kata Asra.

Pengalaman menarik Asra lainnya adalah pada tahun ketiga menempuh pendidikan. Ia kala itu merencanakan untuk lulus tiga setengah tahun dengan asumsi tulisan penelitian sudah mencapai 80 persen. Namun, SPV yang membimbing Asra berhenti dari kampus. Alhasil, ia harus mencari penggantinya.

Kata Asra, mengganti SPV tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi, kala itu, SPV Asra yang baru merupakan profesor senior. Oleh sang pembimbing barunya, Asra diminta mengganti *introduction*, teori, dan analisis. Hal tersebut sempat membuat Asra depresi.

“Ganti SPV ya ganti semuanya. Kebetulan saya dapat penggantinya seorang profesor senior. Sehingga dia

”

Sekolah ke luar negeri bukan hanya gelar yang dibawa pulang, tapi *life experience*-nya juga.

meminta saya mengganti *introduction*, minta ganti teori, minta ganti analisis. Semua dia minta *ganti*, saya agak depresi saat itu.”

Bermodalkan konsistensi yang menjadi moto hidupnya, Asra berjuang keras dalam waktu sembilan bulan tersisa agar bisa lulus tepat waktu. Menurut dia, ia saat itu mengganti sekitar 85 persen tulisan dalam disertasinya.

Dengan segala perjuangan, Asra bisa lulus tepat waktu. “Intinya adalah kita harus konsisten. Orang mungkin *taunya* kita lulus *on time* saja, tapi sebenarnya perjuangan di balik itu, saya jungkir balik luar biasa untuk lulus tepat waktu,” kata dia.

Begitulah Asra, kegigihan membawanya kepada level tertinggi dalam bidang akademis. Baginya pendidikan adalah kunci dari segalanya. Di zaman kompetitif seperti sekarang ini, Asra merasa perlu untuk belajar lebih keras dan menempuh studi setinggi mungkin. Oleh karena itu, ia berpesan kepada generasi muda di BPK untuk meraih ilmu setinggi mungkin.

Asra tentu bukanlah satu-satunya pegawai BPK yang mendapat beasiswa di luar negeri. Sebab, BPK memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini pula yang membuat banyak orang, termasuk para pejabat di BPK saat ini, memilih BPK ketika pertama kali mereka lulus kuliah. ●



■ Bersama dengan *examiners* Dr. Alvise Favotto (kiri) dan Prof. Gloria Agyemang (kanan), ketika Viva Voce PhD.

Strategi Koperasi BPK Bersaing di Era Disrupsi

Para pengurus koperasi terus berpikir keras untuk memajukan usaha koperasi. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba praktis dan kian ketatnya persaingan di dalam industri ritel.

Perilaku masyarakat dalam berbelanja telah berubah seiring berkembangnya zaman. Kini, masyarakat tak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membeli sesuatu. Cukup berbekal ponsel pintar, kita bisa memesan produk atau makanan yang kita mau secara daring. Pesanan pun bisa diantar ke tempat yang kita tentukan.

Tak bisa dimungkiri, pesatnya perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan bagi bisnis konvensional, tak terkecuali bagi Koperasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koperasi mesti pandai-pandai mengatur strategi di tengah himpitan zaman.

Ketua Koperasi BPK Edy Mulya sadar betul akan hal itu. Berbagai strategi telah ia lakukan untuk mempertahankan eksistensi Koperasi BPK yang telah berdiri sejak 1982.

"Koperasi ini berdiri sejak 1982. Namun, baru terdaftar resmi di Dinas Koperasi tahun 1984. Jadi, sampai sekarang usianya sudah hampir 35 tahun," kata Edy.

Ia mengisahkan, perjalanan Koperasi BPK amat panjang. Dahulu, Koperasi BPK hanya menempati satu ruangan di lantai dasar, dekat dengan ruangan biro umum. Kemudian, sekitar 2010, Koperasi BPK akhirnya memiliki gedung sendiri berkat dukungan Badan. Kini, gedung Koperasi BPK terdiri atas dua lantai. Lantai dasar digunakan untuk operasional toko berjualan, sedangkan lantai atas untuk operasional simpan-pinjam, serta



● Ketua Koperasi BPK Edy Mulya

pelayanan lainnya.

Edy mengatakan, para pengurus koperasi terus berpikir keras untuk memajukan usaha koperasi. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba praktis dan kian ketatnya persaingan di dalam industri ritel.

Menurut dia, karakter pelanggan atau konsumen koperasi BPK sekitar 10 tahun lalu berbeda jauh dengan yang sekarang. Dahulu, kata Edy, berbagai macam produk yang dijual di koperasi BPK dipastikan laris manis dibeli kon-

sumen, khususnya oleh pegawai BPK. Namun sekarang, koperasi harus pintar-pintar memilih produk yang akan dijual. Produk yang ditawarkan disesuaikan dengan minat konsumen.

"Karena karakter pegawai BPK mungkin dari 10 tahun yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Dulu sembako saja masih laku, kemudian gula, susu, apalagi susu untuk balita itu laku banget," katanya.

Edy menilai, karakter konsumen dari pegawai BPK saat ini lebih sering berbelanja ke minimarket ataupun supermarket. Menurut dia, hal itu tak lepas dari adanya perbaikan penghasilan dari pegawai. Pegawai lebih memilih tempat belanja yang lebih dekat dengan rumahnya masing-masing. "Dan tidak bisa dimungkiri, kehadiran bisnis *online* juga menambah persaingan di industri ritel," ujar dia.

Koperasi BPK terus berupaya melakukan kreasi agar tetap dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan industri ritel dan kehadiran bisnis daring. Pada 2012, Koperasi BPK pernah menjalin kerja sama dengan salah satu waralaba. Namun, kini Koperasi BPK memilih menjalankannya secara mandiri.

Menurut Edy, bekerjasama dengan waralaba justru membuat beban biaya operasional meningkat. Selama kerja sama berlangsung pun, tidak ada hasil signifikan yang diraih. Sekitar pertengahan 2018, Edy memutuskan agar Koperasi BPK kembali berjalan secara mandiri. "Saat ini dengan beroperasi secara mandiri, Koperasi BPK malah lebih baik," ujar dia.

Setelah mandiri, tim manajer dan pengurus koperasi mulai meningkatkan penjualan dengan kreasi-kreasi yang dimunculkan. Salah satu kreasinya, yaitu jika dulu hanya mengadakan selebaran dalam mengiklankan dan menawarkan produk koperasi kepada para pegawai, kini pemasaran produk juga dilakukan melalui grup-grup media sosial. Kemudian, jenis produk pun yang akan di jual di koperasi didiskusikan terlebih dahulu dengan para pegawai di kantor. "Ini tujuannya agar produk yang dijual di koperasi BPK tepat sasaran," kata dia.

Dia mengungkapkan, konsumen Koperasi BPK lebih meminati produk-produk seperti makanan ringan dan minuman ringan. Maka dari itu, produk sembako sudah bukan target utama konsumen lagi. "Konsumen lebih menyukai produk yang untuk dipakai saat itu juga."

Bentuk strategi lainnya adalah memberikan kemudahan berbelanja. Anggota koperasi BPK bisa berbelanja dengan sistem kredit maksimal Rp500 ribu setiap bulan.

Koperasi BPK memiliki omzet mulai dari Rp100 juta hingga Rp170 juta per bulan. "Omzet sangat variatif. Karena ada masanya pegawai itu kebanyakan tidak di kantor, seperti tugas dinas keluar, tapi kalau lagi *ngumpul* di kantor ya ada peningkatan," Edy menuturkan.



Selain toko, koperasi BPK juga melayani jasa pemesanan tiket dan penginapan bagi pegawai BPK yang sering melakukan perjalanan dinas. Layanan pemesanan tiket dan penginapan tersedia di gedung koperasi lantai 2. Koperasi BPK juga memiliki unit simpan pinjam.

Edy menceritakan, unit simpan-pinjam Koperasi BPK pernah mengeluarkan dana pinjaman dalam sebulan hingga Rp4 miliar. Saat ini, Koperasi BPK memberikan dana pinjaman maksimal hingga Rp150 juta rupiah per anggota.

Syarat mengajukan pinjaman di koperasi tak rumit. Beberapa syarat administratif ialah dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan kartu pengenalan pegawai. Selanjutnya, pihak koperasi akan mengecek langsung ke data milik SDM BPK. Adapun jumlah pinjaman yang akan diberikan disesuaikan dengan rasio penghasilan pengaju pinjaman.

Pinjaman yang diajukan ke koperasi kebanyakan untuk kebutuhan biaya pendidikan. Oleh karena itu, setiap bulan April, Mei, dan Juni, jumlah

pengajuan pinjaman dana meningkat. Selain untuk biaya pendidikan, renovasi rumah merupakan urutan kedua kebutuhan yang biasanya diajukan di lingkungan koperasi BPK. Sedangkan sisanya untuk keperluan konsumtif seperti untuk tambahan uang muka atau membeli rumah dan kendaraan.

Banyak kelebihan yang didapat jika menjadi anggota koperasi dan meminjam di Koperasi BPK ketimbang meminjam di bank, antara lain para anggota mendapatkan kemudahan dalam mengajukan, hanya perlu mengisi formulir, fotokopi KTP, KK dan kartu pengenalan pegawai. Peminjam tidak perlu menunjukkan SK ataupun jaminan pekerjaan.

Keuntungan berikutnya, kata dia, adalah bagi hasil dari pinjaman yang didapat dari koperasi.

"Jika seseorang meminjam ke bank, kan ada bunganya. Bunga tersebut akan menjadi milik bank seluruhnya tanpa ada yang balik kepada peminjam. Sedangkan jika meminjam kepada koperasi, memang akan ada potongan untuk jasa pinjamannya, namun akan masuk ke dalam SHU yang dibagikan kepada anggota. Jadi uang yang kita potong akan kembali ke kita lagi sesuai dengan porsinya, itu kelebihan koperasi, jadi sifatnya kita bagi hasil."

Ke depannya, ada beberapa hal yang ingin ditingkatkan Edy, salah satunya masalah keanggotaan. Edy mengatakan, saat ini anggota koperasi baru mencapai 3.000-an, sedangkan pegawai BPK ada sekitar 7.000-an. Selama ini, keanggotaan koperasi sifatnya sukarela, sehingga pegawai BPK tidak diwajibkan menjadi anggota.

"Jika jumlah pegawai BPK yang ada saat ini bisa dimaksimalkan menjadi anggota koperasi, ini akan menjadi potensi yang sangat besar lagi bagi jalannya bisnis Koperasi BPK. Selain masalah keanggotaan, ada juga rencana untuk membuat koperasi BPK menjadi koperasi syariah. Rencana ini hadir dari banyak saran pegawai yang menginginkan koperasi menggunakan sistem syariah," katanya. ●



■ Karya-karya Naomi

Mengasah Bakat Lukis yang Terpendam

Naomi mengajak pegawai BPK yang memiliki hobi melukis untuk bergabung membentuk paguyuban seni lukis.

Dalam setiap diri manusia, seringkali tersembunyi minat dan bakat yang dimiliki. Namun, tak jarang bakat yang dimiliki seseorang terpendam begitu saja ketika masuk ke dunia kerja. Hal ini seperti yang dialami oleh Naomi Simamora, salah satu staf Kerja Sama Multilateral Biro Humas dan KSI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Naomi memiliki bakat yang terpendam di bidang seni lukis. Rasa cintanya terhadap seni lukis pun tak pernah padam. Ia mulai menyukai kesenian ini sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Saat itu ia sempat mengikuti lomba-lomba melukis di tingkat SD, bahkan pernah menjuarai lomba.

Ketika ditanya mengapa ia senang melukis, ia tidak menemukan jawaban



■ Naomi Simamora

cocok yang lain selain hanya menyukainya. "Ceritanya suka dari kecil, standar anak-anak sekolah ikut lomba, tapi *gak* terlalu sering, paling SD terakhir ikut lomba-lomba," kata Naomi.

Saat memasuki bangku kuliah, Naomi yang mengambil jurusan sastra tetap menjalankan hobi melukisnya. Bahkan pada 2002, ia mengikuti kegiatan Seni Rupa yang ada di kampusnya saat itu. Semua kemampuan melukisnya ia

pelajari secara autodidak. Bahkan, ketika ia aktif di unit kegiatan mahasiswa seni rupa, kegiatan yang ia ikuti lebih kepada kegiatan melukis bersama, tidak ada mentoring atau pelatihan apapun di dalamnya. Ia mengaku tidak pernah mengikuti kursus melukis.

Walaupun tidak berkuliah di jurusan seni rupa, namun Naomi justru mengaku mulai serius terhadap hobinya ini saat kuliah. Media yang ia gunakan untuk melukis pun semakin bervariasi. Awalnya ia melukis menggunakan *drawing pencil*. Ia kemudian mulai mencoba kanvas dengan cat minyak akrilik. Belakangan, ia beralih lagi dan secara intensif melukis menggunakan cat air sampai sekarang. "Sekitar 2-3 tahun terakhir ini saya seringkali melukis menggunakan cat air," kata dia.

Naomi sempat berhenti menjalani hobi melukisnya ketika lulus S1. Karena tak lama setelah lulus, ia langsung mendapatkan pekerjaan. Kesibukan di awal-awal bekerja membuatnya harus mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, serta fokus untuk pekerjaan barunya.



■ Karya-karya Naomi

Namun, ketika ia mulai melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2, sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya pada 2014, ia memiliki waktu cukup longgar untuk kembali melukis. "Setidaknya saat itu saya bisa mengasah kembali kemampuan melukis," ujar dia.

Saat ini pun, Naomi tetap menjalankan hobi melukisnya. Kendati begitu, ia harus pintar-pintar membagi waktu untuk hobi dan pekerjaannya. Sehingga, aktivitas hobinya tak mengganggu pekerjaannya. Ia memilih tetap melukis di hari libur.

Manfaatkan medsos

Naomi mencoba memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mengabadikan hasil karya lukisnya. Ia tak menyangka, karyanya ternyata diminati banyak warganet. Tak sedikit pula yang ingin



memesan lukisan ataupun membeli karya Naomi yang sudah jadi.

"Ketika ada pesanan, sebetulnya antara mau dan *enggak*. Karena ketika ada permintaan, ada kewajiban buat saya. Padahal, niat saya hanya melukis hanya untuk relaksasi di luar kerja."

Karena tak berniat mengkomersialisasikan karyanya, ia sering bingung ketika ditanyakan masalah harga. Namun, menurut dia, harga yang dijual dari setiap lukisannya bervariasi. Lukisan ukuran kecil ada yang dijual seharga Rp200 ribu-Rp300 ribu.

Peminat lukisannya ada yang tertarik dengan lukisan yang ia unggah di Instagram. Ada juga yang meminta untuk digambarkan oleh Naomi dengan mengirimkan gambar kepadanya. Kebanyakan peminat lukisannya memesan lukisan bertema bunga. Menurutna, pangsa pasar dari lukisannya biasanya



untuk penggemar hiasan dinding untuk di rumah, kafe, maupun di perkantoran.

Walaupun ia tidak begitu berminat untuk menjadikannya sebagai bisnis, ia merasakan ada hasil yang lumayan dari hobinya ini. Setidaknya, kata Naomi, uang yang didapat bisa mendukung hobi melukisnya.

"Karena dari hasil menjual lukisan ini, saya bisa gunakan untuk membeli peralatan lagi. Kalau melukis untuk diri sendiri, biasanya mengeluarkan uang Rp100 ribu. Tapi kalau untuk pesanan, bisa mencapai Rp300 ribu," ujar dia.

Naomi berharap suatu saat nanti ia bisa mengadakan pameran seni lukis. Ia juga punya cita-cita untuk membentuk paguyuban seni lukis di lingkungan BPK.

Ia pun bertekad untuk terus mengasah kemampuan seni lukisnya. Naomi ingin mencoba melukis lukisan surealis, seperti lukisan-lukisan benda mati yang dibuat seperti bola dengan kaki-kaki manusia yang dibuat tampak realistis. Namun, untuk saat ini, ia mengaku masih ingin melatih mereplika objek-objek dari foto terlebih dahulu.

Dalam sebulan, Naomi menargetkan bisa menghasilkan 1 atau 2 lukisan. "Saya berharap bisa terus produktif. Dan semoga teman-teman kerja di lingkungan BPK yang memiliki minat dan bakat di seni lukis, mau bergabung untuk membentuk komunitas atau paguyuban seni lukis." ●



BPK Berkomitmen Bangun Zona Integritas



■ Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara membuka *Workshop* Penguatan Kualitas Layanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPK.

BPK telah melakukan beberapa langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam membangun zona integritas.

Badan Pemeriksa Keuangan menyadari perlunya penguatan kualitas pemeriksaan dan kualitas kelembagaan melalui tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. Hal itu perlu dilakukan demi menjalankan mandat BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, BPK menghadapi tantangan yang dapat mengganggu kinerja dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa, seperti pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran terhadap standar, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan gangguan

hubungan dengan para *stakeholder*.

"Salah satu langkah yang dilakukan BPK dalam mengatasi hambatan ini adalah dengan melakukan pembangunan zona integritas," kata Moermahadi saat membuka *Workshop* Penguatan Kualitas Layanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan BPK, di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (11/4).

Moermahadi mengimbau seluruh pelaksana BPK menjalankan komitmen dalam membangun zona integritas. Sehingga, kata Moermahadi, BPK terus menjadi lembaga yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

"Sekuat apapun kita berbuat hasilnya tidak akan optimal jika ada perbuatan-perbuatan dari para pelaksana BPK yang menciderai ke-



■ Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara



percayaan masyarakat,” Moermahadi menegaskan.

BPK telah melakukan beberapa langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam membangun zona integritas. BPK melakukan automasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dalam pelaksanaan pemeriksaan, kegiatan penunjang, manajemen, dan hubungan dengan *stakeholder*. Automasi proses pemeriksaan dan penunjang dilakukan dengan pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SIAP) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM).

Sedangkan untuk pelayanan kepada pihak eksternal, BPK telah menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SISPTL) dan Sistem Aplikasi Informasi Pengaduan (SIPADU). Segala bentuk layanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK diharapkan terus dievaluasi dan diperbaharui, sehingga kepuasan *stakeholder* atas hasil kerja BPK terus meningkat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafrudin turut hadir dalam acara workshop. Ia menekankan agar pembangunan Zona Integritas pada unit kerja segera dilakukan. Setiap unit kerja dapat membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara cepat

dan masif.

“Jangan menunda pembangunan zona integritas. WBK dan WBBM sudah sejalan dengan budaya dan nilai organisasi BPK RI yang independen, integritas, dan profesional. Hal tersebut menandakan bebas intervensi dan KKN, mengutamakan kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar peraturan,” kata Menpan saat memberikan arahan.

Ia menambahkan, pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni

pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Menpan mengungkapkan, pada 2018 terdapat 910 usulan unit kerja percontohan zona integritas menuju WBK/WBBM. Namun, setelah dievaluasi, hanya terdapat 200 unit kerja yang berhak mendapatkan predikat WBK dan lima unit kerja berpredikat WBBM, tiga diantaranya dari BPK RI. ●



■ Penandatanganan Komitmen Bersama Membangun Zona Integritas

Ketua BPK: Junjung Tinggi Nilai-Nilai Dasar BPK



■ Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan arahan.

Selain mendapatkan arahan, para peserta diklat juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan para Pimpinan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang diberikan amanat untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan kredibel, BPK harus diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada kegiatan Pembukaan Rangkaian Diklat CPNS (Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil) Golongan III Akuntansi 2019 di Museum BPK di Magelang, Senin (22/4).

Dalam arahannya di depan peserta diklat CPNS, Ketua BPK mengingatkan para peserta diklat agar mampu bekerja secara profesional dan selalu menjaga nama baik BPK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

"Segala tindakan, perilaku, ucapan, dan sikap kita akan menjadi perhatian publik yang dapat meningkatkan, atau sebaliknya menghancurkan martabat, kehormatan, dan kredibilitas BPK," ungkapny. Oleh karena itu, Ketua BPK menegaskan, integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan dalam bertindak dengan terus mengedepankan independensi dalam bersikap.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK juga berpesan agar



■ Ketua BPK berfoto bersama peserta diklat CPNS.

seluruh peserta memanfaatkan diklat sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dan komitmen dalam mewujudkan BPK yang lebih baik. "Selamat mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, teruslah belajar dan mengembangkan diri karena belajar adalah suatu proses yang tidak boleh berhenti," pungkasnya.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Hery Subowo dalam laporannya menyampaikan, diklat ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan CPNS, pemahaman tentang organisasi BPK, serta pembentukan kompetensi baik pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam pekerjaan sehari-hari sebagai pelaksana BPK, dalam hal ini sebagai pemeriksa.

Rangkaian diklat yang harus dijalani peserta adalah Diklat Orientasi Ke-BPK-an, Pelatihan Dasar CPNS, dan Diklat Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama. Pembukaan diklat ini dilakukan secara serentak di Badiklat PKN Jakarta, Balai Diklat PKN Yogyakarta (dilaksanakan di Museum BPK) dan Balai Diklat PKN Gowa. Pe-

serta diklat berjumlah 193 orang dengan rincian 38 peserta di Badan Diklat PKN Jakarta, 96 peserta di Balai Diklat PKN Yogyakarta, dan 59 peserta di Balai Diklat PKN Gowa.

Pembukaan rangkaian diklat ini juga dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY. Pada kesempatan tersebut, selain mendapatkan arahan, para peserta diklat juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan para Pimpinan BPK. ●



■ Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar berfoto bersama peserta diklat CPNS.

BPK Ambil Sumpah 2 Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018, masa jabatan Anggota MKKE adalah 2 tahun 6 bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki dua anggota baru. Kedua sosok yang dipercaya menjadi anggota baru MKKE BPK adalah Prof. Dr. Rusmin, M.B.A. dan Prof Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang berasal dari unsur akademisi.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memandu pengambilan sumpah kedua anggota MKKE baru tersebut di kantor pusat BPK, Rabu (10/4). Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/4/2019 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dari Unsur Akademisi oleh Panitia MKKE BPK.

Pengambilan sumpah yang berlangsung khidmat ini dihadiri dan disaksikan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota V BPK Isma Yatun. Hadir pula para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BPK. Setelah pengambilan sumpah dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah Anggota MKKE BPK yang disaksikan oleh Ketua BPK.

Anggota II BPK yang juga Ketua MKKE Agus Joko Pramono sebelumnya menjelaskan, MKKE yang bertugas menegakkan kode etik, merupakan amanah pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. "Jadi, kita memang wajib memiliki MKKE," kata Agus kepada *Warta Pemeriksa*, beberapa waktu lalu.

Keberadaan MKKE diatur melalui Peraturan BPK yang sudah diubah beberapa kali. Terbaru adalah Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan itu diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

Untuk melaksanakan fungsi menegakkan kode etik, MKKE



■ Anggota MKKE bersama Ketua, Wakil, dan Anggota BPK.



■ Pengambilan sumpah 2 Anggota MKKE.

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota BPK dan pemeriksa melalui sidang serta rapat. MKKE berwenang memeriksa laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, memanggil dan meminta keterangan data kepada pelapor, terlapor, saksi, dan ahli.

Setelah itu, MKKE memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik. Jika ada pelanggaran, maka MKKE menetapkan jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar untuk kemudian disampaikan kepada Badan melalui Ketua BPK.

Kode etik BPK terdiri atas kewajiban dan larangan yang mesti dijalankan Anggota BPK dan pemeriksa. Dalam hal kewajiban, misalnya, Anggota BPK mesti menghindari terjadinya benturan kepentingan dan menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan.

Adapun bagi pemeriksa, beberapa kewajiban yang mesti dijalankan adalah menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan.

Dalam hal larangan, kode etik BPK antara lain melarang Anggota BPK dan pemeriksa untuk meminta dan/atau menerima uang, barang, serta fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Agus mengatakan, MKKE beranggotakan lima orang. Terdiri atas 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademisi, dan 1 orang dari unsur profesi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018, masa jabatan Anggota MKKE adalah 2 tahun 6 bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. ●

Meningkatkan Ketakwaan Melalui BPK Mengaji



■ Suasana kegiatan BPK Mengaji

Program BPK Mengaji akan tetap dilanjutkan setelah bulan Ramadhan.

Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Alquran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar dan sangat mendatangkan kebaikan. Sebagian orang lainnya merasa tidak sanggup belajar Alquran karena merasa sulit, padahal membacanya sangatlah mudah dan menyenangkan.

Hal tersebut yang coba ditanamkan pengelola Masjid Baitul Hasib Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada para jamaah melalui program BPK Mengaji yang digelar setiap Kamis selama bulan Ramadhan 1440 Hijriyah.

Ketua DKM Baitul Hasib BPK Syamsudin mengatakan, tujuan dari program BPK Mengaji untuk memberikan pelayanan dan pemahaman yang komprehensif mengenai Alquran kepada jamaah masjid.

Ia mengatakan, Masjid Baitul Hasib mendatangkan pendidik dari perguruan tinggi yang kompeten dalam bidang mengajar Alquran. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta agar mampu membaca Alquran dengan baik, lancar dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

"Guru-guru kita datangkan dari perguruan tinggi yang memang bidangnya dalam mengajarkan Alquran, yaitu Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) dan Institut Ilmu Alquran (IIQ). Jadi untuk laki-laki itu PTIQ, dan yang perempuan itu IIQ yang berada di lantai satu," ujar Syamsudin.

Syamsudin menjelaskan, target awal dari program ini adalah melihat seberapa jauh kemampuan bacaan Alquran dari para jamaah. Setelah bulan Ramadhan berakhir, program

diteruskan dengan pengelompokan peserta ajar sesuai tingkat kemampuan membaca.

Dalam perkembangannya nanti, kurikulum yang digunakan akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta. Peserta diarahkan untuk bisa membaca, lancar, hafal, hingga paham Alquran.

"Nantinya target kami sih ada hafalan Al-Quran, kalau dari tahapan awal itu tahsin, setelah tahsin itu ada tahfidz, tahfidz itu menghafal Alquran. Jadi kita pegawai di BPK diharapkan bacaan Alqurannya bagus, kalau bisa menghafal Alquran dengan dibimbing oleh guru-guru yang kompeten," kata dia.

Dia mengatakan, ada banyak keutamaan bagi seseorang jika rutin membaca Alquran. Jika semakin dekat dengan Alquran, maka seseorang juga semakin dekat dengan Allah SWT. Dengan begitu, seseorang bisa terhidar dari sifat serta akhlak yang tidak terpuji karena mereka percaya bahwa apapun yang dilakukan selalu diawasi Allah SWT. "Ini sangat baik untuk meningkatkan kejujuran, integritas, dan profesionalisme pegawai BPK," kata Syamsudin.

Salah satu pegawai BPK, Triana, sangat menyambut baik program BPK Mengaji. Menurut dia, program ini dapat meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadhan.

"Saya kira penting sekali buat kita untuk belajar Alquran dan itu bisa kita praktikan sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor. Disamping untuk memperbaiki bacaan saya sendiri, itu juga bisa saya ajarkan di keluarga saya, untuk anak dan istri saya," tutur Triana.

Triana berharap program ini tak hanya dijalankan di bulan Ramadhan, tapi juga digelar secara rutin setiap bulannya. "Mungkin setelah Ramadhan itu bisa dikategorikan, teman-teman yang sudah lancar kita kelompokkan jadi satu, yang belum lancar, atau belum bisa sama sekali. Saya harap panitia bisa memfasilitasi itu. Mungkin pengajarnya bisa di tambah dan media belajarnya bisa diberikan seperti papan tulis dan buku-buku panduan," harap Triana. ●



■ Suasana kegiatan BPK Mengaji

Manajemen Risiko Menjaga dan Melindungi Reputasi BPK



OLEH
DRS. MAULANA GINTING, M.SI., QIA



RONY LAHI SITORUS, SE., AK,
MTECH, MPA, PHD., ERMCP

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan Kemenpan RB kepada Satker yang dianggap telah melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Piloting* Penerapan Manajemen Risiko BPK tahun 2018 pada satu Unit Inspektorat Utama (Itama) dan satu Satker Auditorat II A dan Sembilan Satker WBK dan WBBM merupakan wujud usaha BPK untuk *Leading by Example*.

Salah satu maksud dibangunnya Manajemen Risiko (MR) adalah untuk melindungi reputasi organisasi dari suatu kemungkinan yang tidak diinginkan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari. Oleh karena itu diperlukan penanganan untuk menghadapi risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Penerapan MR BPK adalah merupakan kelanjutan atas gagasan Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar yang ditandai dilaksanakannya *workshop* MR di Pusdiklat yang menghadirkan pakar MR dari BSN pada akhir 2017. Penerapan MR BPK pada tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BPK dan Surat Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pedoman Penerapan MR di Lingkungan BPK.

Pada tahap berikutnya Pimpinan BPK telah menetapkan Unit Inspektorat Utama, Auditorat II A dan Satuan

Kerja yang telah memperoleh predikat WBK dan WBBM untuk menjadi *piloting* penerapan MR yang terdiri dari Badiklat, Kantor Perwakilan Provinsi Aceh, Riau, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.

Penerapan MR ini terasa semakin lengkap setelah Biro Teknologi Informasi (TI) mengunggah MR pada aplikasi Prisma bersamaan dengan Manajemen Kinerja. Unit dan para satuan kerja peserta *piloting* didorong untuk melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko serta merumuskan langkah-langkah penanganan risiko-risiko. Sasaran lain dari kegiatan *piloting* ini adalah mendorong peserta *piloting* menjadi lebih familiar dengan formulir-formulir yang terdapat di dalam lampiran Pedoman Penerapan MR yang akan digunakan dalam penerapan MR. Dalam kegiatan *piloting* disadari bahwa jangka waktu penerapan MR 2018 yang secara efektif hanya berdurasi 3 bulan membuat peserta *piloting* tidak memiliki waktu yang cukup dalam memonitor risiko-risiko yang teridentifikasi.



freepik.com

Selama kegiatan *piloting*, satker peserta diminta untuk melakukan simulasi penerapan MR dalam satu siklus yang utuh dengan cara melakukan aktivitas dan mengisi formulir-formulir sebagai berikut:

1. Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko;
2. Penetapan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko;
3. Menetapkan sasaran organisasi berdasarkan sasaran strategis dalam Renstra, Rencana Implementasi Renstra, Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis;
4. Mengidentifikasi *stakeholders* untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan unit dan satuan kerja dalam pencapaian sasaran;
5. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait untuk memahami wewenang, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh unit pemilik risiko;
6. Mengenal Kategori Risiko yang menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif;
7. Mengetahui Kriteria Risiko yang digunakan. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak;
8. Menggunakan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang merupakan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko;
9. Menuangkan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko;
10. Mengenal Selera Risiko yang menjadi dasar dalam penentuan Toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko;
11. Menyusun Profil Risiko beserta Rencana Penanganan Risiko;
12. Melakukan Analisis Risiko yang digunakan untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan Satker dan BPK, serta untuk menyusun skala prioritas risiko yang memerlukan perlakuan tertentu;
13. Melakukan Evaluasi Risiko yang meliputi kegiatan penetapan Indikator Risiko Utama (IRU), menentukan batas IRU serta menyusun manual IRU;
14. Melakukan *monitoring* atas kegiatan mitigasi risiko;
15. Melaporkan hasil *monitoring* tersebut dalam format laporan yang telah disediakan;
16. Menyusun Rencana Kontingensi yang terdiri dari langkah-langkah penanganan bencana dan pemulihan kondisi darurat;

17. Mengetahui cara pengisian kejadian bencana yang telah terjadi dalam formulir *Loss Event Database*.

Satker *Piloting* MR yang telah melaksanakan 17 poin kegiatan tersebut juga telah melakukan rencana aksi penanganan risiko operasional, hukum, reputasi, *fraud*, kebijakan dan risiko kepatuhan, berbasis bukti dan siap untuk direviu.

Pembelajaran atas Kegiatan *Piloting* MR

Hasil pembelajaran dari kegiatan *piloting* dapat dipetakan berdasarkan prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko ISO 31000 sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen Risiko

a. Memberikan nilai tambah, dan melindungi nilai organisasi.

Seluruh peserta *piloting* secara aktif telah mengantisipasi dan mengidentifikasi risiko-risiko berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi.

b. MR sebagai bagian terpadu dari seluruh proses organisasi.

Dalam kegiatan *piloting*, MR belum merupakan bagian yang melekat pada seluruh proses organisasi. Tanggung jawab penanganan MR baru menjadi perhatian utama sebagian pimpinan unit kerja dan satker peserta *piloting*. Hal ini disebabkan karena sosialisasi MR di tingkat pimpinan belum dilaksanakan secara meluas.

c. MR sebagai bagian dari pengambilan keputusan.

Konsekuensi dari poin sebelumnya, maka MR belum secara terstruktur menjadi bagian dari pengambilan keputusan unit dan satuan kerja.

d. MR untuk menangani ketidakpastian.

Peserta *piloting* secara aktif melakukan elaborasi atas faktor-faktor ketidakpastian yang dihadapi unit dan satuan kerjanya.

e. MR yang terlaksana secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu.

Peserta *piloting* antusias dan berkomitmen untuk melaksanakan MR secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu.

f. MR yang disusun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.

MR membutuhkan data yang banyak dan berkualitas. Hasil kegiatan *piloting* menunjukkan salah satu kendala yang dihadapi BPK yang terkait dengan mengumpulkan informasi penting yang tersebar.

g. Penerapan MR disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Salah satu yang mendesak adalah penggunaan IRU yang dirasakan belum cukup perlu untuk organisasi yang baru menerapkan MR seperti BPK, karena masih ada kendala terkait ketersediaan data kuantitatif.

h. MR diterapkan dengan mempertimbangkan faktor budaya dan manusia.

Faktor kultur, persepsi, dan kapabilitas SDM dalam menerapkan MR membuat peserta *piloting* mendorong diperluasnya sosialisasi penerapan MR pada setiap tingkat eselon.

i. Transparan dan inklusif.

Dalam kegiatan *piloting* ini, penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko belum melibatkan seluruh bagian organisasi.

j. Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan.

Pinsip MR sebagai kegiatan dinamis dan berulang belum termasuk dalam lingkup kegiatan *piloting* MR.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Integrasi MR dalam aktivitas dan fungsi organisasi yang signifikan belum terlihat dalam kegiatan *piloting* MR 2018. Penentuan konteks organisasi, penyelarasan sasaran manajemen

risiko dengan indikator kinerja organisasi baru dilaksanakan oleh staf atau pejabat yang ditunjuk sebagai manajer risiko. Kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing eselon dalam penerapan MR di BPK belum tercapai.

3. Proses Manajemen Risiko

Kegiatan *piloting* MR telah mendorong peserta *piloting* untuk mengenal tahapan-tahapan dan formulir yang digunakan dalam proses manajemen risiko. Satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tanggung jawab penyusunan formulir-formulir tersebut menjadi beban manajer dan inputer risiko atau dibagi ke setiap eselon.

Simpulan dan Penutup

Kegiatan *piloting* penerapan MR 2018 telah memberikan pembelajaran dan masukan yang cukup mendalam terkait hal-hal yang harus dilakukan. Dengan kondisi dan sumber daya MR yang masih sangat terbatas, BPK telah memberanikan diri untuk memulai suatu terobosan baru menerapkan MR sebagai upaya mengidentifikasi dan menangani risiko organisasi khususnya risiko reputasi, yang sangat berdampak apabila itu terjadi. Penerapan MR untuk tahun 2019 diharapkan telah menjadi budaya organisasi, sehingga dapat menjaga dan mengawal reputasi BPK untuk jangka panjang.

Salah satu potensi negatif terkait penerapan MR yang teridentifikasi dalam kegiatan *piloting* adalah adanya kemungkinan MR akan menjadi kegiatan formalitas belaka. Hal ini dapat terjadi jika integrasi MR dengan fungsi pengambilan keputusan pada setiap lini organisasi belum mempertimbangkan faktor manusia dan budaya organisasi BPK.

Oleh karena itu, Kebijakan dan Pedoman Penerapan MR yang ditetapkan pada tahun 2019 perlu dilengkapi dengan petunjuk teknis tambahan yang mengakomodir pertanyaan dan permasalahan yang telah teridentifikasi dalam kegiatan *piloting* MR 2018. ●



BAZAAR RAMADHAN 1440 H

BPK RI

DAGING
DAN
SEMBAKO
MURAH!!!



**Halaman Parkir
Gedung Arsip BPK**



Senin, 27 Mei 2019

Pukul 09.00 - 14.00 WIB



**DOORPRIZE
MENARIK**



Terdapat lebih dari

130

**stand
bazaar**



<<<

Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Menteri Keuangan Sri Mul-
yani, 8 Mei 2019.



<<<

Pertemuan Baznas dengan Ketua BPK Moermahadi Soer-
ja Djanegara, 1 April 2019.



<<<

Sepak Bola Executive antara BPK dengan OJK, Kemenkeu, LPSE, LKPP dihadiri Ketua BPK Moer-
mahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, 12 April 2019.

>>>

Penyerahan Beasiswa Korban Lion Air oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota V BPK Isma Yatun, 15 April 2019.



>>>

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar sebagai pembicara Kuliah Umum di UIN Mataram di Lombok NTB, 2-3 Mei 2019.



>>>

Konsinyering Pemeriksaan LKKL TA 2018 Auditorat Utama Keuangan Negara I, dihadiri oleh Anggota I BPK RI Agung Firman Sampurna. Acara diselenggarakan di Menara Peninsula Jakarta, 22-27 April 2019.





<<<

Pengarahan Anggota III Achsanul Qosasi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar AKN III dan AKN VII Auditorium BPK RI, 20 Mei 2019.



<<<

Closing meeting Peer Review dihadiri Anggota V BPK Isma Yatun di Kantor Perwakilan Sumatera Barat, 29 Maret 2019.



<<<

Pertemuan Catur Wulan I DWP dalam rangka memperingati Hari Kartini dihadiri oleh Anggota V BPK Isma Yatun, 24 April 2019.

>>>

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis di Auditorium BPK Perwakilan NTT, 2 Mei 2019.



>>>

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Provinsi Papua dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, 3 Mei 2019.



>>>

Pengajian di Masjid Baitul Hasib dihadiri oleh istri Wakil Ketua BPK, istri Anggota II BPK, dan Inspektur Utama BPK Ida Sundari, 9 April 2019.





Jadwal Imsakiyah

RAMADAN 1440 H / 2019 M

PROVINSI DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA

TANGGAL	IMSAK	SUBUH	TERBIT	DUHA	ZUHUR	ASAR	MAGHRIB	ISYA'
1 Ramadhan	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:13	17:49	19:00
2 Ramadhan	04:26	04:36	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	19:00
3 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	19:00
4 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	19:00
5 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:18	11:53	15:13	17:48	18:59
6 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:19	11:53	15:13	17:48	18:59
7 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:19	11:53	15:13	17:48	18:59
8 Ramadhan	04:25	04:35	05:50	06:19	11:53	15:13	17:48	18:59
9 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:19	11:53	15:14	17:47	18:59
10 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:19	11:53	15:14	17:47	18:59
11 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:19	11:53	15:14	17:47	18:59
12 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:19	11:53	15:14	17:47	18:59
13 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:20	11:53	15:14	17:47	18:59
14 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:20	11:53	15:14	17:47	18:59
15 Ramadhan	04:25	04:35	05:51	06:20	11:53	15:14	17:47	18:59
16 Ramadhan	04:25	04:35	05:52	06:20	11:53	15:14	17:47	19:00
17 Ramadhan	04:25	04:35	05:52	06:20	11:53	15:14	17:47	19:00
18 Ramadhan	04:26	04:36	05:52	06:21	11:53	15:14	17:47	19:00
19 Ramadhan	04:26	04:36	05:52	06:21	11:53	15:14	17:47	19:00
20 Ramadhan	04:26	04:36	05:52	06:21	11:53	15:14	17:47	19:00
21 Ramadhan	04:26	04:36	05:52	06:21	11:53	15:14	17:47	19:00
22 Ramadhan	04:26	04:36	05:53	06:21	11:53	15:14	17:47	19:00
23 Ramadhan	04:26	04:36	05:53	06:22	11:53	15:14	17:47	19:00
24 Ramadhan	04:26	04:36	05:53	06:22	11:54	15:15	17:47	19:00
25 Ramadhan	04:26	04:36	05:53	06:22	11:54	15:15	17:47	19:00
26 Ramadhan	04:26	04:36	05:53	06:22	11:54	15:15	17:47	19:01
27 Ramadhan	04:26	04:36	05:54	06:22	11:54	15:15	17:47	19:01
28 Ramadhan	04:27	04:37	05:54	06:23	11:54	15:15	17:47	19:01
29 Ramadhan	04:27	04:37	05:54	06:23	11:54	15:15	17:47	19:01
30 Ramadhan	04:27	04:37	05:54	06:23	11:54	15:15	17:48	19:01



*Selamat Menjalankan
Ibadah Puasa
Ramadan
1440 Hijriyah*

